



BULETIN KIPRAH KALTARA

KINERJA PEMIMPIN DAERAH KALTARA

Edisi I 2022



**Memulihkan Ekonomi,
Melipur Imbas Pandemi**

Optimisme Tinggi Wujudkan Kaltara Berubah, Maju, dan Sejahtera

"Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur/wakil gubernur dengan sebaik-sebaiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang, dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,".

Demikian sumpah janji diucapkan Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum dan Dr. Yansen TP, M.Si di hadapan Presiden Ir. Joko Widodo, tepat 15 Februari 2021 di Istana Negara, Jakarta pertanda keduanya mulai mengemban amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara).

Lebih kurang sudah setahun sumpah dan janji tersebut diucapkan. Merefleksi perjalanan setahun terakhir dengan pencapaian yang telah diraih, memunculkan optimisme tinggi dan baru untuk menapaki pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan di provinsi paling bungsu di Tanah Air. Tantangan kondisi ketidakpastian global dan nasional akibat pandemi COVID-19 baik dalam dua tahun terakhir dan maupun akan datang, menjadikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tidak mudah berpuas. Tantangan dan tuntutan pembangunan yang kian pesat menjadi penguat dalam mewujudkan cita-cita Kaltara Berubah, Maju, dan Sejahtera.

Kaltara di bawah kepemimpinan Zainal A Paliwang dan Yansen TP didukung seluruh komponen masyarakat kini 'berlari' guna mewujudkan program pembangunan daerah yang dicita-citakan, yang disiratkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Program-program pembangunan mengarah pada terlaksananya misi pembangunan daerah, yaitu mewujudkan Kaltara Berubah, Maju, dan Sejahtera terperinci dalam 14 misi demi pencapaian 16 tujuan pembangunan yang pelaksanaannya dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pencapaian keberhasilan pembangunan 2021-2026 itu dilaksanakan melalui Pendekatan Prioritas Pembangunan dan Pendekatan Gerakan Kaltara Rumah Kita.

Gubernur Zainal Arifin Paliwang dan Wakil Gubernur Yansen TP yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 dan dilantik pada tanggal 15 Februari 2021 untuk masa bakti 2021-2024 mempunyai tekad dan semangat siap melaksanakan Gerakan Kaltara Rumah Kita untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan melalui kerjasama dan kemitraan multipihak.

Kaltara adalah rumah bersama yang harus dibangun dengan sebaik-baiknya agar terus maju dan berkembang kuat; dirawat dengan sepenuh hati supaya bersih, indah, tertib, aman dan nyaman; dikelola dengan bijaksana supaya sumber daya alam dan lingkungan lestari dan berkelanjutan; dipelihara dengan segala daya supaya memberikan suasana damai dan penuh persaudaraan bagi anak-anak, pemuda dan pemudi, serta perempuan dan ibu; dan dikembangkan dengan segala usaha dan daya supaya rakyat hidup sejahtera, maju dan bermartabat. *

Redaksi

Pengarah
Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Utara

Penanggungjawab
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara

Redaktur
Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

Editor
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara

Reporter
Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Penyedia Informasi Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara

Fotografer
Kepala Sub Bagian Penetapan Materi Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Sub Bagian Dokumentasi Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara

Perwajahan
Staf Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara



Foto : BPMI, Sekretariat Presiden

Raih Masa Depan dengan Gerakan Kaltara Rumah Kita

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi ke-34 mempunyai potensi dan kekayaan sumber daya alam, wilayah daratan yang luas, dan wilayah laut yang menyipakan ragam kekayaan, serta keanekaragaman penduduk dengan kekayaan budaya yang unik dan menarik. Saat ini Kaltara masih menghadapi berbagai keterbatasan sehingga dikenal dengan sebutan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Namun dari aspek geostrategis, Provinsi Kaltara mempunyai prospek masa depan yang sangat menjanjikan karena berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei, dan dekat dengan lokasi calon Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara; serta posisi strategis sebagai Kawasan lintasan perdagangan dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

Berbagai kemajuan telah dicapai, namun masih banyak permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus diatasi secara bersungguh-sungguh dan tuntas. Sebagai provinsi terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga akan menghadapi tantangan pembangunan antara lain masih terbatasnya jangkauan dan mutu pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, perumahan dan permukiman, air bersih, sanitasi dan listrik; lemahnya konektivitas transportasi; terbatasnya jaringan komunikasi dan informasi; masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran; belum berkembangnya rantai nilai produksi, pengolahan dan perdagangan komoditas unggulan daerah; belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang bermutu dan merata; serta belum meratanya pembangunan desa, kecamatan dan kabupaten/kota.

Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum dan Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si bertekad dan penuh semangat siap melaksanakan Gerakan Kaltara Rumah Kita untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan melalui kerjasama dan kemitraan multipihak.

Gerakan Kaltara Rumah Kita merupakan gerakan bersama yang didasarkan pada semangat, harapan dan tindakan meraih masa depan membangun peradaban baru yang produktif, adaptif, partisipatif, dan emansipatif. Gerakan ini didasarkan pada visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara Berubah, Maju, dan Sejahtera yang memuat gelora dan getaran semangat untuk mengajak seluruh rakyat bersama-sama berubah dalam meraih kemajuan dan kesejahteraan, berubah untuk maju, dan maju untuk menggapai kesejahteraan.

Gerakan Kaltara Rumah Kita berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa, nilai-nilai moralitas agama dan dan nilai-nilai keutamaan budaya yang menegaskan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar rakyat atas dasar kesetaraan, keadilan dan inklusif. Gerakan ini juga sejalan dengan komitmen global dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan melakukan pengurangan risiko bencana dengan prinsip pengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, mengikutsertakan semua (*leave no one behind*), dan mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

"Gerakan Kaltara Rumah Kita menempatkan masyarakat dan pemerintah desa, kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pelaku



utama dan pusat perubahan menuju standar dan paradigma baru. Paradigma Gerakan Kaltara Rumah Kita juga merupakan penegasan dan pembaharuan dari paradigma pembangunan yang berpusat kepada rakyat," tutur Gubernur.

Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat, dan juga sebagai wujud konsistensi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan daerah. Gerakan Kaltara Rumah Kita merupakan kesungguhan, keinginan dan tekad bulat dari seluruh pemangku kepentingan baik Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah/Dinas, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda/pemudi, pelaku usaha, perguruan tinggi dan lainnya untuk secara bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan Kaltara. *

Gerak Cepat Bangun Kawasan Industri

Salah satu misi pembangunan Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H, M.Hum dan Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si ialah meningkatkan kinerja pembangunan dan investasi daerah dengan melibatkan pengusaha dan investor lokal, nasional, dan multinasional. Baik Gubernur maupun Wakil Gubernur, ingin mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan nilai tambah, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah satu tindaklanjutnya ialah pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan yang telah dimulai Februari 2022. Proyek ini menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Presiden Joko Widodo menyebutnya *Green Industrial Park* atau Kawasan Industri Hijau terbesar di dunia dengan luas 20.000 hektare.

Pembangunan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi diarahkan untuk pengembangan industri pengolahan skala besar yang mengubah bahan baku daerah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi antara lain smelter (fasilitas pemurnian) aluminium berbahan baku bauksit, pabrik minyak nabati dan minyak nonnabati berbahan baku *Crude Palm Oil* (CPO), dan lainnya. KIPI juga diarahkan menjadi jalur pembuka distribusi dan perdagangan barang antarwilayah dari dan menuju Kalimantan Utara (Kaltara). Dan, sekaligus mendukung pengembangan investasi.

Integrasi pembangunan KIPI selain diharapkan meningkatkan daya tarik investasi daerah. Juga diproyeksikan meningkatkan efisiensi dan insentif pengembangan industri, mendukung pengendalian dan pengawasan dampak industri terhadap lingkungan, dan menguatkan konektivitas antarwilayah terutama layanan distribusi dan alih muat angkutan laut dalam jumlah besar dengan jangkauan pelayanan yang luas sebagai bagian dari simpul jaringan transportasi laut internasional.

"Bersama-sama pemerintah (pusat), kami telah melakukan langkah-langkah pelaksanaan pra konstruksi, konstruksi, pasca konstruksi, dan operasi yang meliputi studi kelayakan, penyiapan rencana induk (master plan) dan rencana bisnis (bisnis plan), perizinan, pembebasan tanah, dan mobilisasi peralatan," ujar Gubernur.



Presiden Joko Widodo berbicara dengan Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang bersama Forkopimda Kabupaten Bulungan di kawasan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, 21 Desember 2021.

Foto : BPPI, Sekretariat Presiden



Foto : BPPI, Sekretariat Presiden

Termasuk pula kegiatan pra rekrutmen tenaga kerja, pembukaan dan pematangan lahan, pembangunan sarana prasarana, pembangunan pabrik, pembangunan infrastruktur pelabuhan, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Menurut Gubernur, akan disiapkan pula kelembagaan pengelola kawasan, penyiapan infrastruktur pendukung di luar kawasan, promosi kawasan industri, layanan operasional pusat uji dan sertifikasi, operasionalisasi penyediaan utilitas, operasionalisasi SDM, dan operasionalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), fasilitasi pengelolaan dan kerjasama antarlembaga dan internasional, serta aglomerasi pengembangan usaha lain di luar kawasan industri seperti perhotelan, perumahan, pertokoan, pendidikan, transportasi dan telekomunikasi dan lain-lain.

"Penyiapan KIPI perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari kita semua. Termasuk Pemkab, Kementerian/Lembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat, dukungan DPRD, media massa, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya," tutur Gubernur.

Pembangunan KIPI akan mendongkrak capaian kinerja pembangunan daerah dari berbagai indikator, seperti pertumbuhan industri, pertumbuhan ekonomi, PDRB, pertumbuhan investasi atau penanaman modal. Termasuk penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan, tingkat kesenjangan pendapatan, kondisi jalan, dan tingkat akses infrastruktur dasar. Peletakan batu pertama pembangunan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Desember 2021.

Bagi Wakil Gubernur, pembangunan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi tak hanya menguntungkan bagi pelaku industri besar. Masyarakat yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakal ikut merasakan dampaknya. "Keberadaan tenaga kerja untuk membangun kawasan, akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi signifikan bagi para pelaku usaha kecil," tuturnya.

Masyarakat setempat yang umumnya berprofesi nelayan berpeluang meningkatkan taraf perekonomiannya melalui perluasan usaha seperti pembukaan usaha warung makan, toko

sembako, jasa transportasi, hingga properti atau perumahan. Proyek infrastruktur ini akan menyerap sekitar 100 ribu orang tenaga kerja. Untuk itu, Wakil Gubernur mengajak masyarakat Kaltara mempersiapkan diri mengambil peluang ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja di sana. "Bisa kita bayangkan jika sebanyak 100 ribu tenaga kerja itu bekerja, berapa banyak kebutuhan atau stok bahan pangan yang dibutuhkan. Belum lagi kegiatan pengerjaan proyek yang bisa dikerjakan oleh kontraktor lokal," ujarnya. *

Basis Transformasi Ekonomi Indonesia

Indonesia akan memulai transformasi ekonomi melalui hilirisasi industrialisasi bahan mentah dan pemanfaatan energi hijau. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, *groundbreaking* Kawasan Industri Hijau Indonesia menjadi awal dimulainya transformasi ekonomi Tanah Air.

"Ini betul-betul suatu lompatan transformasi ekonomi Indonesia dan dimulai dari sini, sehingga kita bisa mengelola sumber daya alam kita dari hulu sampai ke hilir," tutur Presiden Jokowi saat melakukan *groundbreaking* Kawasan Industri Hijau Indonesia, di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, pada Selasa, 21 Desember 2021.

Presiden menuturkan keberadaan kawasan industri tersebut akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti terbukanya lapangan pekerjaan baru yang juga dapat berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Kepala Negara menjelaskan manfaat kawasan industri tersebut akan dirasakan secara riil 5 sampai 10 tahun akan datang. Oleh karena itu, sumber daya manusia dengan kualifikasi yang baik perlu dipersiapkan udalam mendukung kawasan industri tersebut secara optimal.

"Dalam masa kontruksi disampaikan bahwa akan muncul kurang lebih 100 ribu tenaga kerja yang dibutuhkan, pada saat operasi hanya di sini saja belum anak cucu turunan dari produk-produk yang dihasilkan itu 60 ribu (tenaga kerja). Perkiraan saya lebih dari 200 ribu (tenaga kerja) plus anak cucu keturunan dari produk-produk yang dihasilkan," tuturnya.

Presiden juga mengapresiasi kawasan industri yang akan menggunakan teknologi-teknologi mutakhir dalam operasionalnya. Hal tersebut tidak terlepas dari kerja sama Indonesia dengan sejumlah investor dalam negeri dan luar negeri, seperti Cina dan Uni Emirat Arab.

"Ini kerjasama besar antara Indonesia, investor Indonesia, investor dari Cina, investor dari Uni Emirat Arab semuanya akan bergabung dan ini kita harapkan akan menjadi kawasan industri terbesar di dunia, bukan Kalimantan Utara, bukan



Foto : BPPI, Sekretariat Presiden

Indonesia, tapi dunia karena menyangkut lahan sampai detik ini 16.400 hektar dan targetnya adalah 30 ribu hektar," papar Presiden.

Presiden pun berpesan kepada jajaran terkait untuk mengawal dengan baik pembangunan kawasan ini agar menjadi kawasan yang kondusif dan aman bagi para investor. Terkait perizinan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengawal dan mempercepat proses perizinan sehingga tidak timbul permasalahan sekecil apapun.

Menko Luhut Binsar Pandjaitan dalam laporannya menyebut bahwa seluruh perizinan telah dikoordinasikan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Ia turut mengapresiasi peran pemerintah daerah dan Forkopimda di Kaltara yang telah mendukung pengembangan kawasan industri tersebut. "Dukungan Bapak Gubernur Kaltara dan Bapak Bupati Bulungan ini sangat-sangat signifikan serta segenap jajaran Forkopimda sangat juga luar biasa dalam mendukung pengembangan kawasan ini. Seluruh perizinan kami dapat

laporkan Bapak Presiden dapat cepat kita koordinasikan dan mengikuti aturan yang ada," tuturnya.

Saat *groundbreaking* pada 21 Desember lalu, selain Presiden Joko Widodo dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, turut hadir Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Konsorsium Indonesia Garibaldi Thohir, Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP, dan Bupati Bulungan Syarwani. *

Rumah Industri Manufaktur Dunia



Foto : Dokpim Kaltara/Anggi

Langkah Indonesia untuk bersaing secara global, dilakukan melalui pengembangan Kawasan Industri Hijau di wilayah Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kawasan Industri Hijau Indonesia yang notabene pertama di dunia ini akan memiliki luas mencapai 30.000 hektare setelah melalui beberapa tahap pengembangan. Pembangunan kawasan ini dapat terlaksana berkat kerjasama antara Indonesia, Cina, United Emirat Arab (UEA).

Indonesia membuat dua kriteria industri di wilayah industri hijau ini. Pertama, industri diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari kekayaan bahan mentah yang dimiliki. Nilai tambah tersebut akan semakin tinggi dengan diproses melalui sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dimiliki. Kedua, industri yang dibangun dapat menempatkan Indonesia pada posisi kunci dalam pemanfaatan teknologi ke depannya.

"Kami menyebutnya *future industries*. Oleh karena itu, industri baterai yang akan dibangun di sini nantinya tidak hanya berbasis nikel, tetapi juga nonnikel. Kita juga akan membangun pabrik solar panel dan *precision engineering manufacturing facility*," jelas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada *groundbreaking* Kawasan Industri Hijau di wilayah Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, pada 21 Desember 2021.

Kawasan ini akan dibangun teknologi terkini, seperti pembangunan pabrik aluminium smelter untuk mempercepat hilirisasi dan mendukung sektor pembangunan di Indonesia. Kawasan ini juga dapat dimanfaatkan dalam perkembangan pembangunan *new energy battery* yang dapat mendukung program pemerintah dalam meningkatkan penurunan emisi pada 2030 melalui penggunaan kendaraan listrik. Adapun rencana pembangunan fasilitas di kawasannya mencakup pembangunan pelabuhan, bandara, hotel, dan akomodasi karyawan.

Kawasan Industri Hijau ini akan menjadi lompatan transformasi ekonomi Indonesia dari hasil ekonomi nonhijau ke ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan *sustainable*. Kawasan ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diperoleh melalui penerimaan negara yang meningkat, neraca perdagangan surplus, dan tercapainya pemerataan ekonomi. Hal tersebut dapat diperoleh dari pengelolaan sumber daya dari hulu ke hilir, khususnya di kawasan tersebut.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut telah berkoordinasi dengan Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan untuk dibangun Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai langkah mempersiapkan SDM bagi pembangunan kawasan industri ini. PT KIPPI juga telah berkomitmen untuk membangun Politeknik guna mendidik SDM lokal untuk

bekerja di wilayah ini.

"Hal ini penting karena jumlah penyerapan tenaga kerja pada saat proses konstruksi bisa mencapai 100 ribu dan kemudian akan turun menjadi 50-60 ribu pada saat proses operasi," sebut Menko Luhut.

Menko Marves berharap investor juga turut mengajak partner lokal, baik pengusaha nasional dan daerah dalam pengembangan kawasan. Hal ini dapat dicapai melalui transfer teknologi, sehingga akan membangun kapasitas industri nasional secara keseluruhan. Kemudian, hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu melibatkan UMKM di daerah agar turut merasakan hasil pembangunan di wilayah Kawasan Industri Hijau Tanah Kuning-Mangkupadi. *



Foto : BPPI, Sekretariat Presiden

"Kami menyebutnya future industries. Oleh karena itu, industri baterai yang akan dibangun di sini nantinya tidak hanya berbasis nikel, tetapi juga nonnikel. Kita juga akan membangun pabrik solar panel dan precision engineering manufacturing facility,"

PLTA Kayan-PLTA Mentarang Solusi Krisis Energi Masa Depan

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Mentarang dan PLTA Sungai Kayan adalah salah satu prioritas pembangunan Kalimantan Utara (Kaltara) yang merupakan penjabaran visi 2021-2016 Kaltara Berubah, Maju, Sejahtera. Prioritas pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan PLTA Sungai Kayan merupakan pelaksanaan dari misi mewujudkan ketahanan energi dan pengembangan PLTA serta mengembangkan energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah.

Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum mengatakan pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan PLTA Sungai Kayan diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik di banyak sektor. Mulai dari rumah tangga, perkantoran, dan industri yang terus meningkat kebutuhannya, khususnya di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau. Bahkan dapat mendukung penyediaan listrik di Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan.



Sumber: Dinas PUPR Perkim Kaltara

Lebih dari itu pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan PLTA Sungai Kayan akan membawa dampak ganda terhadap kinerja pembangunan daerah terutama peningkatan investasi, pengembangan industri, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat. Selain itu, perluasan jaringan listrik juga akan mendukung peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Yang tidak kalah pentingnya pembangunan PLTA turut mendukung pengembangan energi listrik baru dan terbarukan provinsi paling bungsu ini.

Untuk merealisasikannya diperlukan langkah-langkah terukur. Pemprov Kaltara telah melakukan fasilitasi pelaksanaan survei lapangan, perencanaan, perizinan, pembebasan lahan, pencarian investor, pembangunan waduk dan saluran air, pembangunan jalan akses, pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi.

Pembangunan PLTA akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terutama Pemprov Kaltara, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah (Pusat), masyarakat, pengusaha atau penanam modal, BUMN, perguruan tinggi, media massa, dan mitra pembangunan lainnya.

Gubernur telah menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pembangunan PLTA melakukan percepatan-

percepatan dan upaya fasilitasi lainnya. OPD yang dimaksud antara lain Bappeda dan Litbang, Dinas Perkerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Pembangunan PLTA Mentarang oleh PT Kayan Hydropwer Nusantara (KHN) di Kabupaten Malinau terus dikebut termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Bahkan, rancangan proyek PLTA Mentarang telah dipaparkan secara virtual ke Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan (PDLUK KLHK) oleh jajaran PT KHN. Pertemuan itu dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur pada 19 September 2021.

Sebelumnya juga Gubernur menegaskan PLTA Sungai Kayan mendapat suntikan investasi senilai Rp 180 triliun dari perusahaan Australia, Fortescue Future Industries Pty Ltd, yang merupakan anak usaha Fortescue Metals Group. Untuk diketahui, dua proyek PLTA di Kaltara ini diharap menjadi sumber energi penggerak Kawasan Industri Hijau atau Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi secara jangka panjang.



Foto: Dokpim Kaltara/Johan

"Dua PLTA tersebut kita proyeksikan untuk memenuhi kebutuhan KIPI dalam jangka panjang. Untuk itu, kita pun akan menyiapkan alternatif berupa pembangkit bertenaga surya dalam rangka menopang KIPI. Hal ini sudah kita rapatkan bersama Pak Menko Marves dan Menteri ART/BPN," tuturnya. *

Prioritas Pembangunan Kalimantan Utara 2021-2026

- Mewujudkan pembangunan PLTA Sungai Kayan dan Sungai Mentarang
- Mewujudkan pembangunan KIPI
- Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai laut, dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme penganaan fasilitas dan regulasi di setiap kabupaten/kota.
- Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman, dan daerah terpencil dalam rangka Membangun Desa Menata Kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai, udara, dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota.
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota.
- Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi pokok dan keunggulan komparatif setiap kabupaten/kota.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun
- Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenial.
- Mewujudkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di setiap kabupaten/kota.
- Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat Desa dan RT, tenaga pendidikan dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman, pedalaman, dan terpencil, serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pemprov Dekat dengan Masyarakat, Berbuah Provinsi Terbahagia di Indonesia



Foto: Dokpim Kaltara/Khair

Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir Desember 2021 merilis Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK). Kalimantan Utara (Kaltara) menempati posisi kedua, selisih tipis dengan Maluku Utara di peringkat pertama. Indeks kebahagiaan Maluku Utara tercatat sebesar 76,34. Provinsi Kaltara berada di peringkat kedua dengan indeks kebahagiaan sebesar 76,33. Selanjutnya, Maluku berada di peringkat ketiga dengan nilai 76,28.

Indeks kebahagiaan BPS disusun atas 3 dimensi. Dimensi kepuasan hidup yang terdiri dari subdimensi personal dan sosial, dimensi perasaan, dan dimensi makna hidup. BPS mendapat hasil indeks ini dari Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan. Survei dilaksanakan pada 1 Juli - 27 Agustus. Sampel survei adalah rumah tangga yang dipilih secara acak.

Dimensi yang berkontribusi terbesar dalam penyusunan Indeks Kebahagiaan adalah Dimensi Kepuasan Hidup, yaitu sebesar 34,80 persen. Adapun kontribusi Dimensi Makna Hidup sebesar 34,02 persen. Sementara Dimensi Perasaan, berkontribusi sebesar 31,18 persen.

Variasi besaran kontribusi ini terjadi karena

penduduk memberikan penilaian dengan derajat yang beragam terhadap setiap indikator. Besaran kontribusi suatu indikator menggambarkan derajat pentingnya indikator tersebut terhadap Indeks Kebahagiaan penduduk. Semakin besar kontribusi suatu indikator, maka semakin penting pula indikator tersebut bagi kebahagiaan penduduk.

Lantas bagaimana kesan Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H, M.Hum dengan kabar gembira ini? Simak jawabannya dalam petikan wawancara berikut ini:

Provinsi Kaltara menempati posisi ke-2 terbaik di Tanah Air untuk Indeks Kebahagiaan. Apa kesan Bapak Gubernur mendengar kabar ini?

Sebagai Gubernur, saya tentu bersyukur bahwa Provinsi Kaltara menempati posisi ke-2 terbaik di Indonesia untuk Indeks Kebahagiaan dengan perolehan sebesar 76,33. Hanya selisih tipis dari Maluku Utara yang memperoleh poin 76,34. Saya tidak memandang indeks ini hanya pada sisi materil, namun kondisi sosial yang relatif aman serta kerukunan masyarakat yang terjaga justru menjadi aspek penting bagi capaian Indeks Kebahagiaan Kaltara. Saya juga melihat capaian

ini bentuk dari peningkatan taraf hidup masyarakat serta kedekatan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga masyarakat mudah menyampaikan aspirasinya.

Kabar gembira ini bisa menjadi acuan Bapak dalam pembangunan segala bidang khususnya pendidikan, yang sesuai dengan data BPS berada di angka yang masih kurang memuaskan. Apa upaya Bapak Gubernur untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat agar mampu lebih kompetitif, berdaya saing, dan unggul?

Pendidikan merupakan sektor prioritas kami. Satu dari sepuluh prioritas pembangunan Kaltara 2021-2026 adalah 'Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawaskan Kebangsaan. Sejauh ini, kami telah melaksanakan program-program peningkatan kualitas pendidikan antara lain program pembangunan maupun rehabilitasi beberapa satuan pendidikan menengah. Kita pun telah menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Padjajaran, Universitas Patria Artha, Universitas Bosowa, Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, dan lainnya.'



Foto: Dokpim Kaltara/Awad

Kami juga menjalin kesepakatan dengan Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) yang kita ketahui merupakan program kemitraan antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia. INOVASI berupaya memahami cara-cara untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa di sekolah-sekolah yang ada di berbagai kabupaten di Indonesia, terutama dalam hal kemampuan literasi dan numerasi. Selain di Kaltara, INOVASI diimplementasikan di beberapa daerah di Indonesia seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Jawa Timur (Jatim).

Selain itu, demi menjamin masyarakat maupun pemuda dan generasi penerus di Kaltara tidak hanya menjadi penonton dengan adanya Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning-Mangkupadi, kami mendorong penyediaan Jurusan Industri di Sekolah Menengah Kejuruan di Kaltara. Selain itu, pemerintah (pusat) juga telah berkomitmen membangun Politeknik sebagai penunjang keberadaan KIPI di Kaltara.

Dari pencapaian Indeks Kebahagiaan tertinggi kedua di Indonesia, indikator keamanan Provinsi Kaltara juga tercatat cukup tinggi. Ini berarti jaminan yang baik bagi iklim investasi. Bagaimana tanggapan Bapak?

Pertama-tama, saya berterimakasih kepada seluruh jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara dan Komando Resor Militer 092/Maharajalila atas sinergi yang baik dengan seluruh pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan. Kita saat ini memang sedang mengejar geliat investasi sebagai upaya untuk menggerakkan roda perekonomian. Investasi juga catatan penting dalam penyampaian visi misi Presiden Joko



Foto: DKISP Kaltara

Widodo pada tanggal 14 Juli 2019 yang lalu, yaitu 'Kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan. Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya.'

Peningkatan investasi akan ikut andil dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai komponen dari pendapatan nasional Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross

Domestic Product (GDP). Dalam upaya kita untuk memberikan kemudahan investasi, kepastian hukum, dan jaminan investasi, serta perbaikan regulasi yang telah akan dikeluarkan merupakan keniscayaan untuk dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, sekaligus menciptakan keterbukaan investasi. Terlebih kita saat ini sedang membangun Kawasan Industri Hijau atau Green Industrial Park yang telah di-groundbreaking oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada 21 Desember 2021 di Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan *

Akselerasi Pembangunan di Tengah Pandemi Covid-19



Foto: Dokpim Kaltara/Johan

Hingga kini dunia global terus berjuang melawan pandemi Covid-19. Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) senantiasa terus melakukan upaya mewujudkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, tanpa mengesampingkan penanganan dampak penyebaran Covid-19 dalam rangka memulihkan ekonomi daerah yang pada gilirannya ikut menopang pemulihan ekonomi nasional. Seperti apa upaya mengakselerasi pembangunan Kaltara di tengah pandemi Covid-19, berikut petikan wawancara dengan Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H, M.Hum:

Bagaimana menentukan prioritas pembangunan provinsi?

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program program unggulan SKPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan penjabaran dari visi misi dengan tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Prioritas pembangunan pada Provinsi Kaltara, sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD, yang kita ketahui bersama mencakup 10 hal prioritas. Dalam konteks pandemi Covid-19, sebagaimana

kita ketahui bersama bahwa pandemi ini berimbas terparah pada sektor kesehatan dan ekonomi, kedua sektor ini juga menjadi perhatian penuh dalam prioritas pembangunan kita.

Apa saja langkah perencanaan dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan tersebut?

Penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan unsur pemangku kepentingan di dalamnya, Pemprov Kaltara melibatkan Bupati/Wali Kota, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh masyarakat guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial pada daerah dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Perencanaan telah diukur dengan baik, dengan memperhitungkan beberapa hal yaitu tujuan akhir yang dikehendaki; sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkan (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif); jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut; masalah-masalah yang dihadapi; modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya;

menentukan orang, organisasi, atau badan pelaksanaannya; serta mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaannya.

Lantas, bagaimana koordinasi dengan semua pihak untuk menyukseskan program-program tersebut?

Koordinasi adalah satu dari beberapa fungsi penting dalam manajemen, kesuksesan koordinasi akan menjamin keberhasilan pelaksanaan pekerjaan atau pencapaian tujuan organisasi dalam kegiatan sehari-hari, apapun itu. Jika pola koordinasi baik, tujuan tim lebih besar kemungkinan untuk tercapai.

Komunikasi informal telah dibangun dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pelaksanaan kegiatan coffee morning dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bupati/Walikota, Kementerian/Lembaga yang melaksanakan tugas di Provinsi Kaltara. Biasanya turut membahas kejadian yang menonjol sehingga meningkatkan kepercayaan dan hormat dari antar pimpinan, sehingga permasalahan dapat ditanggulangi secara bersama-sama.

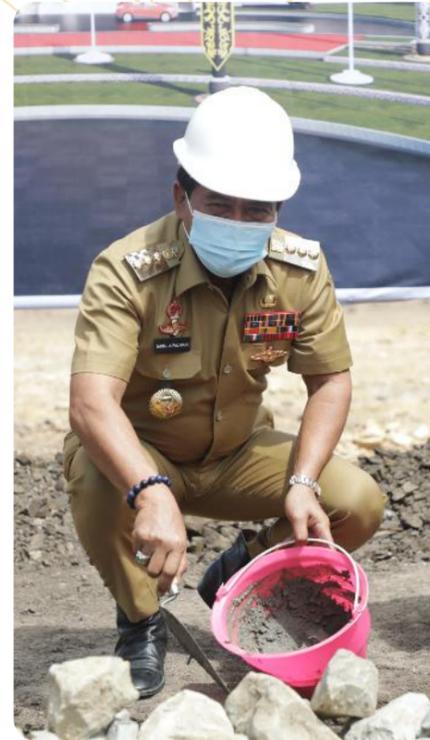


Foto: Dokpim Kaltara/Khair

dicapai, cara mengukur keberhasilannya, jangka waktu pelaksanaannya, cara melaksanakan, kebijaksanaan untuk menjamin proyek itu dapat dilaksanakan, dan biaya serta tenaga yang diperlukan. Sehingga harus jelas keterkaitan proyek dengan tujuan dan sasaran program, serta dengan proyek-proyek lain yang berada dalam program yang sama.

Setelah merencanakan, bagaimana proses monitoring atau evaluasi pembangunan?

Untuk mewujudkan Provinsi Kaltara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera diperlukan kerjasama dan sinergi seluruh stakeholder. Kabupaten/Kota merupakan pilar bagi Provinsi. Oleh karena itu dalam melaksanakan monitoring/evaluasi pembangunan juga melibatkan seluruh perangkat daerah Pemprov Kaltara dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan monitoring/evaluasi pembangunan dilakukan secara terjadwal untuk masing-masing kabupaten/kota yang dipimpin langsung oleh kepala daerah baik secara langsung dilaksanakan peninjauan lapangan maupun melalui rapat evaluasi. Salah satu kunci dari monitoring dan evaluasi pembangunan kami adalah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Karena dapat dikatakan bahwa unsur pemerintahan di kabupaten dan kota yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Terlebih dalam masa pandemi seperti saat ini, koordinasi perlu untuk terus dilakukan. Terutama untuk penanganan pandemi Covid-19. Semakin cepat kita bisa menangani pandemi, semakin cepat kita dapat melanjutkan program-program pembangunan yang lain.

Bagaimana menjamin pelaksanaan pembangunan sejalan dengan tema yang sudah diusung?

Tema pembangunan Provinsi Kaltara 2021 adalah 'Konsolidasi Kebijakan Pembangunan Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan'. Dua hal ini yang menjadi hal pokok yang harus kita lakukan, apalagi kita masih berada dalam pandemi Covid-19, yang kita ketahui bersama imbas terbesar dari pandemi adalah pada sektor kesehatan dan ekonomi. Meski demikian, kita tidak mengesampingkan pembangunan pada sektor lain.

Pemprov tetap menjamin bahwa proyek-proyek pembangunan secara fisik dilaksanakan atau dibiayai tersedia anggarannya, serta berjalan sesuai dengan tenggat waktu, dan mencapai sasaran seperti yang telah direncanakan. Dengan memperhatikan tujuannya, sasaran yang akan

Di masa sekarang, media massa merupakan wadah atau sarana utama dalam hal penyebaran informasi. Kami selalu berusaha memanfaatkan media massa maupun sosial untuk mengedukasi masyarakat terkait pandemi Covid-19. Itu adalah salah satu strategi kami (pemprov) dalam melakukan percepatan penanganan covid-19. Sebagai contoh, kami (pemprov) juga memiliki akun media sosial @covid_19kaltara yang memang khusus digunakan untuk menyebarkan informasi terkait penanganan Covid-19. Organisasi perangkat daerah Pemprov Kaltara juga intensif melaksanakan sosialisasi penanganan dan pencegahan Covid-19 melalui akun media sosial masing-masing instansi. Dengan memanfaatkan media massa, pemerintah daerah serta lembaga mitra pemerintah dapat saling bersinergi dalam menangani pandemi Covid-19 serta yang paling penting saat ini adalah percepatan vaksinasi. Dalam penyusunan konten pemberitaan, kami tentu membuat konten yang informatif, edukatif dan persuasif yang menekankan partisipasi publik pada kepatuhan protokol kesehatan salah satunya 5M yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas atau interaksi. Kesediaan vaksinasi merupakan hal penting untuk menekan dampak pandemi. *

Bagaimana media massa maupun media sosial dalam melakukan sinergi dalam percepatan penanganan Covid-19, yang berperan dalam penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat?



Foto: Dokpim Kaltara/Khair

Bergerak Bersama Milenial Bangun Optimisme Kemajuan



Foto: Dokpim Kaltara/Khair

Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Yansen TP, M.Si berpandangan, kaum milenial merupakan generasi yang penuh dengan sikap optimis dan kreativitas. Mereka memiliki semangat yang sangat tinggi untuk melakukan dobrakan-dobrakan. Menurutnya, penting bagi Pemprov Kaltara untuk merangkul para generasi milenial, agar sikap optimis, kreativitas, dan semangat juang itu dapat bernilai positif untuk pembangunan.

Berikut tanggapan lainnya Dr. Yansen TP, M.Si perihal keberadaan kaum milenial di Kaltara:

Sejauh mana Bapak memberi dukungan dan pembinaan kaum milenial untuk dapat menjadi mitra Pemprov Kaltara?

Saya memberikan rasa aman, bergairah, dan produktif bagi para milenial Kaltara untuk saat ini dan ke depan. Saya berupaya untuk membuat para milenial nyaman untuk terus mengasah diri dan berkontribusi di berbagai kesempatan. Harapan saya, generasi milenial Kaltara menyatukan gairah dan semangat generasi muda untuk memikirkan masa depan Kaltara. Dengan turut mengajak para milenial menjadi mitra pemerintah, diharapkan dapat membawa aspirasi dan menjadi penghubung pemerintah dengan kalangan anak muda.

Tidak sedikit milenial Kaltara terjun ke dunia entrepreneur dan industri kreatif lainnya. Apa yang dapat Pemprov Kaltara berikan untuk mendukung tumbuh kembang usaha mereka di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda sekarang ini?

Tren milenial yang terjadi di Kaltara saat ini cukup besar dan baik, walaupun di tengah pandemi. Yang sebagaimana diketahui bahwa salah satu efek dari pandemi adalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Namun, kaum milenial Kaltara mampu mendongkrak hal tersebut menjadi sebuah investasi lapangan pekerjaan bagi sesamanya dengan membuka sejumlah usaha pribadi seperti yang disebutkan: kafe, kedai, warkop, bahkan sejumlah usaha home made secara online.

Didukung oleh gaya hidup generasi milenial yang cenderung sangat dekat dengan teknologi, menuntut sikap proaktif sebagai pencipta teknologi tersebut, bukan hanya sebagai pengguna, membuat kaum milenial semakin pro dalam usahanya. Hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam mendukung tren tersebut adalah memberikan pelatihan dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para generasi muda untuk dapat mengembangkan potensi dan bakatnya.

Adapula milenial yang menggeluti bisnis fashion bernuansa etnik lokal Kaltara. Ini tidak lepas dari kebijakan Bapak Gubernur yang mendorong pelestarian kearifan lokal. Bagaimana pandangan dan tanggapan Bapak terkait fenomena positif ini?

Meskipun sederhana, kita sadar bahwa kebijakan dari Bapak Gubernur untuk bangga menggunakan produk-produk aksesoris khas Kaltara memiliki dampak yang luar biasa positif. Saya turut bangga, anak-anak muda Kaltara merespons hal ini dengan sangat baik, dan turut serta mensukseskan kebijakan ini.

Kebijakan ini memiliki multiplier effect yang baik terhadap industri kreatif dan home industry di Kaltara. Kita ingin kekayaan lokal Kaltara menjadi kekuatan untuk membangun ekonomi yang berdampak langsung secara positif di masyarakat.

Kita juga ingin membuat branding Kaltara di luar Kalimantan utara. Branding ini tentu penting, dan kita membutuhkannya untuk melancarkan dan mensukseskan pembangunan.

Untuk mewujudkan Kaltara, Berubah, Maju, dan Sejahtera, peran apa saja yang Bapak harapkan dari kaum milenial di Kaltara? Lalu bentuk dukungan apa yang Bapak telah dilakukan untuk mereka?

Milenial merupakan cerminan dari kreativitas dan optimisme. Ini kita butuhkan, mengingat dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah ingin ada terobosan-terobosan dan ide-ide baru, agar pembangunan menuju kesejahteraan dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah ingin para generasi muda menjalani minat dan bakatnya masing-masing. Kita butuh generasi muda yang bergerak di segala bidang, seperti teknologi, industri kreatif, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lainnya.

Pemerintah akan memberi ruang kepada para generasi milenial untuk berkreasi dan berinovasi. Selaras dengan Pak Gubernur, kami bersama-sama berupaya mendukung milenial Kaltara di berbagai bidang, terutama di bidang olahraga, seni, dan juga di bidang ekonomi kreatif.

Kami terus gelorakan dan bangkitkan potensi-potensi seni dan budaya di Kaltara, karena Kaltara mempunyai keragaman suku dan budaya. Kami akan mencoba membantu memberi jalan para milenial untuk hidupan pariwisata Kaltara dengan pagelaran-pagelaran budaya yang menampilkan tari-tarian dan kebudayaan khas Kaltara, salah satunya dengan menggelar Musik Alam Festival sebagai wujud inovasi mendukung seni dan budaya tradisional.

Untuk olahraga, kami terus berpikir keras mencari cara membangkitkan olahraga tradisional dan membuat atlet-atlet berkembang sehingga memiliki prestasi. Dengan terbentuknya KORMI (Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia) kami berupaya melakukan pembinaan yang maksimal untuk menggali potensi atlet dengan melakukan seleksi di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga tingkat provinsi. Menghidupkan olahraga tradisional merupakan bagian menghidupkan semangat masyarakat.

Kemudian, sekaligus untuk meningkatkan perekonomian di Kaltara, kami juga memberikan dukungan penuh pada pelaksanaan ekonomi kreatif. Selain mengeluarkan aturan penggunaan batik khas daerah Kaltara bagi ASN dan Non ASN di lingkup Pemprov Kaltara, beberapa waktu lalu, kami melalui Dekranasda Provinsi memberikan pelatihan membordir dan desain menggunakan teknologi yang pesertanya adalah kaum milenial lulusan SMK. *



Foto: Istimewa

IPM Kaltara Bergeser Naik



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada tahun 2021 mencapai 71,19, meningkat 0,56 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, peningkatan IPM didukung oleh peningkatan pada semua komponen, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak.

IPM Provinsi Kaltara 2021 kembali meningkat setelah sempat mengalami penurunan pada 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. IPM ini 2021 tumbuh sebesar 0,79 persen.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, peningkatan IPM Provinsi Kaltara 2021 didukung peningkatan pada semua komponennya. Pengeluaran per kapita disesuaikan yang sebelumnya mengalami penurunan, kembali meningkat sebesar 3,64 persen dibandingkan tahun 2020.

Pada dimensi pendidikan, penduduk yang pada tahun 2021 berusia 7 tahun memiliki harapan

lama sekolah selama 12,94 tahun atau hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I, lebih lama 0,01 tahun dibandingkan dengan yang berumur sama pada 2020. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,11 tahun, dari 9,00 tahun pada tahun 2020 menjadi 9,11 tahun pada tahun 2021.

Pada dimensi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,65 tahun, lebih lama 0,06 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Dengan capaian tersebut, pembangunan manusia Provinsi Kaltara masih berstatus tinggi. Sejak 2013 hingga 2021, IPM Kaltara mencatat pertumbuhan per tahun sebesar 0,58 persen.

Dari catatan Bappenas, catatan IPM Provinsi Kaltara masih lebih tinggi dibanding beberapa

provinsi lain di Tanah Air seperti Sumatera Selatan (70,24), Nusa Tenggara Timur (62,28), Nusa Tenggara Barat (68,65), Kalimantan Barat (67,90), Sulawesi Tengah (69,79), Gorontalo (69,00), Sulawesi Barat (66,36), Maluku (69,71), Maluku Utara (68,76), Papua Barat (65,26), dan Papua (60,62).

Meningkatnya IPM Provinsi Kaltara sejalan dengan mulai meningkatnya kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan dengan mudah. Akses dalam hal ini terkait dengan kondisi sosial ekonomi bagi masyarakat yang dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan secara merata, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada dimensi standar hidup layak, daya beli masyarakat dalam setahun terakhir mulai tumbuh seiring dengan membaiknya penanganan Covid-19 yang bermuara pada penurunan jumlah kasus aktif secara signifikan, serta massifnya vaksinasi di Provinsi Kaltara.

Pada dimensi kesehatan, status kesehatan masyarakat Kaltara mulai meningkat. Perbaikan infrastruktur dan kualitas tenaga kesehatan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tumbuhnya capaian angka harapan hidup penduduk saat lahir di Provinsi Kaltara. Dimensi kesehatan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kesehatan semata, tetapi mencakup kualitas pendidikan yang makin baik, inflasi yang terkendali, pemenuhan gizi masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, dan bidang sosial ekonomi. *

Lalui Masa Sulit, Ekonomi Tumbuh Impresif 7,01 Persen



Foto: Dokpim Kaltara/Khair

Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil membaik dari bayang-bayang pandemi Covid-19. Kontraksi negatif sebesar 1,11 persen yang sempat terjadi pada 2020 lalu, pada 2021 berhasil tumbuh 3,98 persen. Dan, secara year on year (yoy) berhasil tumbuh 7,01 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara dalam rilis resminya pada 7 Februari 2022 mencatat perekonomian Kaltara 2021 sebesar Rp 110,67 triliun diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Sementara PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp 16,2 triliun atau meningkat 0,31 triliun rupiah dibanding triwulan III sebesar Rp 15,9 triliun.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,55 persen. Secara spasial, Provinsi Kaltara menempati posisi kedua tertinggi di regional Kalimantan tepat berada di bawah Kalimantan Barat (Kalbar) yang mencatatkan pertumbuhan 4,78 persen.

BPS Provinsi Kaltara mencatat pada lapangan usaha pertanian, tercatat mengalami pertumbuhan 6,23 persen. Ini didukung sejumlah produksi kayu di Kaltara yang mengalami peningkatan. Selain itu, lapangan usaha pertanian juga didorong subkategori perikanan yang tumbuh hingga 7,29 persen. Ini didukung peningkatan jumlah masyarakat pesisir yang menggeluti bidang budidaya rumput laut dan tingginya permintaan pasar.

Pada sektor pertambangan, diketahui terjadi pertumbuhan hingga 14,96 persen didukung kategori pertambangan minyak dan gas bumi yang tumbuh 4,59 persen. Pertumbuhan ini

didorong peningkatan pada permintaan kilang minyak di Kalimantan Timur (Kaltim).

Sempat down akibat kebijakan *lockdown* di sejumlah negara, produksi batu bara ikut tumbuh 8,91 persen. Pertumbuhan sektor ini seiring dengan tingginya permintaan dari mitra dagang Kaltara sebagai tujuan ekspor produk Kaltara baik yang dicatat menurut asal barang maupun menurut asal pelabuhan.

Dari sisi lapangan industri pengolahan tumbuh 3,57 persen. Terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada industri kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 8,23 persen. Disusul pertumbuhan industri furnitur sebesar 5,67 persen, serta industri makanan dan minuman sebesar 4,69 persen yang dipicu oleh produk (*Crude Palm Oil*) CPO dan biota laut seperti udang beku.

Sektor perdagangan tumbuh tinggi di angka 10,22 persen. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), Indeks Keyakinan Konsumen masyarakat pada triwulan IV meningkat 19,38 persen dibanding triwulan IV 2020. Hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi sudah mulai membaik. Daya beli masyarakat pun semakin tinggi yang kemudian mendorong tumbuhnya kategori perdagangan.

Penjualan kendaraan roda dua dan roda empat di Kaltara mengalami peningkatan masing-masing sebesar 14,21 persen dan 15,8 persen. Capaian positif ini tidak terlepas dukungan pemerintah melalui relaksasi pajak PPnBM 0 persen sampai Desember 2021 kemarin. Lapangan usaha transportasi mengalami pertumbuhan 8,44 persen. Akselerasi positif pada sektor ini disebabkan adanya maskapai yang kembali mengudara di Tanjung Selor dengan rute

penerbangan ke Balikpapan per 1 Desember 2021.

Pada saat yang bersamaan, pelaku usaha jasa kurir mencatatkan lonjakan permintaan pengiriman pada puncak Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional) 12.12. Animo masyarakat Kaltara terhadap momen pesta belanja online di tahun 2021 membuat permintaan pengiriman barang meningkat drastis dibandingkan tahun 2020. Hal ini sejalan dengan data aktivitas angkutan barang melalui kapal laut di triwulan IV 2021 naik 33,95 persen dibandingkan triwulan IV 2020.

Adapun, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum juga tumbuh 8,43 persen. Hal ini didorong, kategori penyediaan makan minum tumbuh 9,37 persen. Salah satu faktor pendorongnya yakni program Kuliner Karang Rejo. Yakni proyek Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Kementerian PUPR 2021 yang berhasil meningkatkan omzet pedagang kecil, terutama pada usaha penyedia makan minum.

Adapun okupansi atau Tingkat Pengisian Kamar (TPK) hotel berbintang pada akhir tahun lalu mengalami pertumbuhan signifikan di angka 30,45 persen. Hal ini didorong beberapa kegiatan nasional dan regional seperti kunjungan presiden dan libur Natal serta tahun baru.

Berbeda dengan lapangan usaha di atas, sektor konstruksi justru mengalami kontraksi negatif pada periode akhir tahun. Pada triwulan IV 2020, lapangan usaha konstruksi mengalami penurunan hingga 4,68 persen. Berdasarkan data pengadaan semen dari Asosiasi Semen Indonesia, di triwulan IV 2021 terjadi kontraksi permintaan semen hingga 19,69 persen dibandingkan triwulan IV 2020.

Masih terpuruknya sektor ini juga disebabkan produksi industri bukan logam seperti batu bata yang lesu. Ini disebabkan adanya penurunan permintaan. Belanja modal pemerintah juga menurun di triwulan IV karena adanya *recofussing* anggaran. Ini sangat mempengaruhi sektor konstruksi di Kaltara. Selain lapangan usaha konstruksi, sektor pengadaan air turut mengalami kontraksi 2,34 persen.

Pada lapangan usaha lainnya, tercatat jika sektor pengadaan listrik tumbuh 10,17 persen, sektor informasi dan komunikasi tumbuh 8,97 persen, sektor jasa keuangan tumbuh 4,63 persen, sektor *real estate* tumbuh 2,22 persen, sektor perusahaan tumbuh 8,67 persen, sektor administrasi pemerintahan tumbuh 0,09 persen dan jasa pendidikan tumbuh 6,53 persen. *



Foto: Dokpim Kaltara/Khair

Setahun Penduduk Miskin Turun 3,4 Ribu Jiwa



Foto: Dokpim Kaltara/Johan



"Tingkat pengangguran terbuka kita 4,58 persen. Dan angka kemiskinan 6,8 persen. Dibandingkan provinsi lain di Kalimantan, Provinsi Kaltara masih relatif baik. Kita akan terus berupaya keras menekan angka kemiskinan," tegasnya dalam berbagai kesempatan.

Tren Positif Berlanjut di 2022

Tren pertumbuhan ekonomi Provinsi Kaltara yang impresif bisa tetap berlanjut pada 2022 ini. Hal ini diprediksi Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltara pada Laporan Perekonomian Provinsi Periode November 2021.

KPw BI menulis, masih akan ada peningkatan kinerja pada lapangan usaha utama yang diperkirakan dapat memacu akselerasi kinerja investasi, ekspor, dan konsumsi rumah tangga. Lapangan usaha tersebut mencakup pertambangan sebagai motor penggerak utama, didukung lapangan usaha konstruksi dan perdagangan. Ketiga lapangan usaha utama tersebut bakal menjadi pemacu utama (*main drivers*) peningkatan perekonomian Kaltara 2022.

Namun terdapat risiko tidak mampu setinggi capaian tahun 2021. Ini disebabkan adanya beberapa sentimen global yang memberikan dampak kurang baik terhadap sektor pertambangan. Sentimen tersebut diantaranya telah sepakatnya negara G7 untuk menghentikan

pembiayaan terhadap segala proyek pertambangan sejak awal tahun 2022 ini. Kemudian seiring dengan pernyataan Presiden Tiongkok, Xi Jin Ping yang akan mengurangi penggunaan batubara pada tahun 2022, akan mempengaruhi permintaan terhadap batu bara Kaltara. Sebab Tiongkok merupakan negara importir batu bara terbesar dengan pangsa mencapai lebih dari 70 persen.

Namun demikian, berdasarkan *commodity outlook* (gambaran umum harga komoditas) yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF), harga batu bara pada tahun 2022 bergerak pada rentang USD 100-150/metrik ton. Nominal itu masih merupakan harga yang cukup baik untuk mendorong kinerja sektor pertambangan.

Lebih lanjut, lapangan usaha perdagangan juga diyakini akan tumbuh meningkat seiring dengan peningkatan konsumsi rumah tangga karena didorong vaksinasi yang diyakini sudah mencapai target lebih dari 90 persen untuk dosis I.

Hal itu akan mengurangi risiko diberlakukannya kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dapat mempengaruhi ekspektasi dan daya beli masyarakat. Kemudian dari lapangan usaha konstruksi, peluang terus berlanjutnya pembangunan Kawasan Industri Hijau Tana Kuning, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan beserta beberapa proyek strategis lain di Kaltara menjadi potensi pendorong peningkatan kinerja konstruksi pada tahun ini. *

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menurun. Berdasarkan catatan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara, persentase penduduk miskin di provinsi ini per September 2021 adalah 6,83 persen atau sebanyak 49,49 ribu penduduk.

Angka itu menurun sebesar 0,53 persen poin dibandingkan pada periode Maret 2021, yang angka kemiskinan mencapai 7,36 persen atau sebanyak 52,86 ribu penduduk. Artinya jumlah penduduk miskin berkurang 3,4 ribu jiwa dibanding periode Maret 2021.

Menurunnya angka kemiskinan ini dipengaruhi oleh beberapa fenomena sosial ekonomi. Antara lain pertumbuhan ekonomi Provinsi Kaltara yang kian membaik, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, dan peningkatan pekerja di sektor formal. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kaltara pada triwulan III tahun 2021 tumbuh positif, sebesar 5,24 persen secara tahunan. Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 0,39 persen poin pada Agustus 2021.

Perubahan pekerja formal juga mempengaruhi penurunan angka kemiskinan. Pada Agustus 2021, tercatat sebanyak 49,26 ribu orang bekerja pada kegiatan formal. Angka itu meningkat 0,39 persen poin dibanding Agustus 2020.

Namun, menurunnya persentase jumlah penduduk miskin belum sebanding dengan garis kemiskinan. BPS mencatat, selama Maret hingga September 2021, garis kemiskinan (GK) justru naik sebesar 2,72 persen. Yaitu dari Rp 710.994,- per kapita per bulan pada Maret 2021 menjadi Rp 730.342,- per kapita per bulan pada September 2021. Pada periode Maret hingga September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan juga mengalami kenaikan. Dari 0,872 pada keadaan Maret 2021 menjadi 0,893 pada keadaan September 2021. Meskipun begitu Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan dari 0,177 menjadi 0,173.

Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan gini ratio tercatat sebesar 0,285. Angka ini juga menurun jika dibandingkan dengan gini ratio pada Maret 2021. Distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 23,01 persen pada September 2021. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H, M.Hum pun komitmen penuntasan kemiskinan daerah menjadi prioritas kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si. Perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus dalam lima tahun ke depan.

la optimis kemajuan Kalimantan Utara bisa terwujud dengan sinergitas bersama serta didukung potensi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan mulai dari sumber daya hydropower, minyak, gas alam, kehutanan, ekowisata, pertanian, dan perikanan.

Dan, merujuk pada dimensi penyebab kemiskinan, Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H, M.Hum dan Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si bersama seluruh stakeholder berkomitmen penuh melaksanakan intervensi pada sejumlah dimensi pembentuk kemiskinan yakni konsumsi, kesehatan, infrastruktur dasar, ekonomi, ketahanan pangan, dan ketenagakerjaan. *

Penanganan Pandemi Ditopang Rp 120 M

Dengan kapasitas anggaran yang tersedia, Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) tetap memprioritaskan pembiayaan penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya. Dalam kebijakannya, Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum dan Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si tetap menjaga permintaan dan ketersediaan barang di sektor usaha. Termasuk menjaga tingkat konsumsi dan daya beli agar perekonomian tetap bergerak.

Kebijakannya ialah memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Kaltara mengalokasikan dana dalam APBD sebesar Rp 10,2 miliar. Jumlah tersebut telah terealisasi sebesar Rp 9,2 miliar atau sekitar 90,20 persen. Adapun program khusus pemulihan ekonomi dampak Covid-19 dianggarkan sebesar Rp 17,6 miliar, yang hingga akhir tahun 2021 mampu terserap 16,8 miliar atau 95,6 persen.

Sehingga, total anggaran dukungan ekonomi dalam program pemulihan ekonomi daerah yang mencapai Rp 27,9 miliar, mampu terealisasi 93,6 persen atau setara Rp 26,1 miliar. Alokasi ini telah berkontribusi memberi dorongan besar terhadap perekonomian daerah, khususnya menstimulasi pertumbuhan ekonomi pada sektor UMKM dan dunia usaha lainnya.

Adapun program dukungan perlindungan sosial melalui bantuan sosial mencapai Rp 3,9 miliar. Alokasi ini terserap 56,01 persen atau senilai Rp 2,1 miliar dari total alokasi. Gubernur mengatakan, pemberian bantuan sosial dalam rangka program pemulihan ekonomi daerah akan terus digenot demi meringankan beban pengeluaran masyarakat. Termasuk pula diharapkan mampu menjaga pola konsumsi dan daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan ikut mempercepat 'laju mesin' pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari sisi dukungan belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya bagi penanganan Covid-19, Pemprov Kaltara mengalokasikan dana sebesar Rp 87,6 miliar. Dana tersebut terbagi dalam beberapa uraian kegiatan. Dalam uraian penanganan Covid-19 dianggarkan sebesar Rp 58,9 miliar, telah terealisasi Rp 54,4 miliar atau sebesar Rp 92,3 persen. Lalu, dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi mencapai Rp 254 juta dan terealisasi 98,3 persen.

Pemprov juga memberi dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp 360,4 juta, insentif tenaga kesehatan Rp 20,07 miliar, serta belanja kesehatan lainnya

dan kegiatan prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp 8 miliar. Masing-masing alokasi itu terealisasi 92,37 persen, 93,9 persen, dan 100 persen. Jika diakumulasikan dukungan program pemulihan ekonomi daerah dan dukungan pendanaan belanja kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19 lebih kurang mencapai Rp 120 miliar.

Sebagai bagian penyelamatan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, Gubernur bersama Wakil Gubernur terus mendorong ketahanan investasi dan berupaya keras serta memfasilitasi investor merealisasikan rencana investasinya seperti perealisasi Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan dan PLTA Mentarang, serta investasi oleh anak-anak perusahaan PT Pertamina (Perseroan) yang akan mengeksplorasi sumur-sumur Migas di Kaltara seperti Wilayah Kerja (WK) Nunukan, WK Seimanggaris, WK Tarakan, WK Tarakan Offshore, dan WK Bengara I.

Koordinasi antara OPD Pemprov Kaltara dengan TNI/Polri, BUMN, BULOG dalam mendukung kelancaran distribusi logistik ke semua wilayah Provinsi Kaltara juga dikuatkan demi menjaga stabilisasi pasokan dan harga bahan pokok. Selain itu, berupaya melakukan model distribusi pangan yang efisien, melakukan peningkatan kemampuan lembaga petani, dan merencanakan, mengejar, dan menerapkan aspek pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Upaya pemulihan ekonomi juga dilaksanakan beriringan dengan pelaksanaan program prioritas seperti pendalaman sektor penerimaan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapat Asli Daerah khususnya sektor Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemprov yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Pembukaan jalur transportasi dengan tetap mempertahankan penerapan standar protokol kesehatan juga menjadi perhatian bersamaan dengan pengembangan infrastruktur dan proyek strategis. Termasuk perbaikan data program dan perlindungan sosial serta peningkatan sektor kepariwisataan dengan menciptakan upaya-upaya peningkatan kepercayaan wisatawan datang kembali ke Kaltara.

Dan kunci pentingnya adalah melakukan penguatan sektor kesehatan seperti penguatan

vaksinasi tahap I, II, dan III, dan langkah penanggulangan wabah lainnya. Termasuk pengadaan alat kesehatan hingga intensif tenaga kesehatan.

Gubernur juga menegaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terus digenot melalui langkah intensifikasi maupun ekstensifikasi. Sebab tantangan pembangunan yang makin kompleks ke depan serta tantangan pandemi Covid-19 yang masih terus mengancam, menuntut pembiayaan yang makin meningkat. *

PROYEKSI INDIKATOR MAKRO PROVINSI KALTARA 2023



Pertumbuhan
Ekonomi
5,36–6,26%
(Nasional 5,3–5,8%)



Tingkat Pengangguran
Terbuka
4,45%
(Nasional 5,3–6%)



Angka
Kemiskinan
6,70–6,0%
(Nasional 7–8%)



Gini Ratio
0,283
(Nasional 0,375–0,378)



Indeks Pembangunan
Manusia
71,41
(Nasional 73,29–73,35)

Sumber: Bappeda & Litbang Provinsi Kaltara.

LAPORAN REALISASI DUKUNGAN PROGRAM PEMULIHAN, PENDANAAN BELANJA KESEHATAN DAN PRIORITAS LAINNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH PROV. KALTARA TAHUN 2021

- Perlindungan Sosial
Bantuan Sosial :
Rp. 3.902.646.648
- Dukungan Ekonomi
Pemberdayaan UMKM :
Rp. 10.290.416.000
Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19
Rp. 17.667.998.217

Total :
RP 31.861.060.865

REALISASI DUKUNGAN PENDANAAN BELANJA KESEHATAN TAHUN 2021

- Penanganan Covid-19
Rp. 58.964.969.107
- Dukungan Vaksinasi
Rp. 259.000.000
- Dukungan pada kelurahan
dalam rangka penanganan
Pandemi
Rp. 360.421.953

- Insentif tenaga kesehatan daerah
dalam rangka penanganan
Pandemi
Dokter Spesialis
Rp. 2.845.000.000
Dokter Umum
Rp. 2.383.571.429
Bidan dan Perawat
Rp. 12.679.048.286
Tenaga Kesehatan Lainnya
Rp. 2.164.294.857
- Belanja Kesehatan lainnya
yang ditetapkan pemerintah pusat
Rp. 8.000.000.000

8,12%

PERSENTASE DUKUNGAN PENDANAAN
BELANJA KESEHATAN
DAN BELANJA PRIORITAS

Rp. 87.656.305.632

JUMLAH DUKUNGAN PENDANAAN
BELANJA KESEHATAN

Rp. 1.079.265.408.000

ALOKASI DAU / DBH TA 2021

Rp. 87.656.305.632

JUMLAH DUKUNGAN PENDANAAN BELANJA KESEHATAN
DAN BELANJA PRIORITAS LAINNYA

*DAU : Dana Alokasi Umum

*DBH : Dana Bagi Hasil

Sumber: Bappeda & Litbang Kalimantan Utara

BIRO ADPIM KALTARA



Tingkatkan Daya Saing Lewat Wajib Belajar 16 Tahun



Foto: Dokpim Kaltara/Khair

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun merupakan salah satu program prioritas Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H, M.Hum dan Dr. Yansen TP, M.Si sepanjang masa kepemimpinan keduanya ke depan. Misinya adalah mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing, dan berwawasan kebangsaan.

Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si mengungkapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang terdidik, terampil, dan produktif. Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jaringan informasi luas dan mempunyai sikap disiplin, bertanggung jawab, dan berwawasan kebangsaan kuat juga hal mutlak dimiliki generasi penerus Kaltara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan provinsi termuda di Tanah Air ini. Maka itu, Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) akan memastikan semua anak usia sekolah (3-18) mengikuti pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah secara aktif.

"Tidak hanya itu. Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar juga kita akan lakukan. Akses anak usia sekolah mengikuti pendidikan menengah harus diperluas.

Termasuk pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. Juga meningkatkan keterampilan dan keahlian di bidang teknologi informasi, magang dan pendidikan vokasional," tuturnya.

Ia menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan. Semuanya harus mengambil peran. Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, perangkat daerah Pemprov, Pemkab/Pemkot, Pusat, swasta, DPRD, perguruan tinggi, dan lainnya.

Kesempatan Berusaha Kaum Milenial

Di luar pendidikan wajib belajar 16 tahun, Pemprov juga berupaya memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha dan ekonomi bagi kaum milenial. Arahnya ialah mendidik dan menyiapkan generasi muda (kaum milenial) menjadi calon tenaga kerja terampil, kompeten, berkualitas dan berdaya saing.

Terhadap calon wirausahawan diharap dapat membuka usaha sendiri dan memperluas lapangan pekerjaan sejalan dengan pembangunan KIPi, revitalisasi pertanian dalam arti luas, pembangunan infrastruktur, diversifikasi produk, dan pembangunan PLTA (Pembangkit

Listrik tenaga Air) dan lainnya.

Untuk mendukung hal-hal tersebut, Pemprov akan membangun dan mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai tempat pendidikan dan pelatihan keterampilan dan keahlian melalui pemetaan jenis keahlian dan keterampilan, dan kebutuhan tenaga terampil dan terdidik yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Termasuk penyiapan kurikulum dan tenaga pengajar yang berpengalaman dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Perluasan kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha swasta dan perguruan tinggi dalam pengelolaan BLK, magang, perekrutan tenaga kerja juga jadi faktor penting. *

Beasiswa Kaltara Unggul Tersalur ke 6.273 Penerima



Foto: Dokpim Kaltara/Khair

depan, kapasitas keuangan daerah mengalami peningkatan agar alokasi Beasiswa Kaltara Unggul dapat kita tingkatkan," tutur Gubernur. Beasiswa Kaltara Unggul sejatinya turut diarahkan sebagai salah satu instrumen dalam memberikan perlindungan sosial masyarakat pada sektor pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Harapannya, beban pengeluaran masyarakat semakin ringan dengan beasiswa.

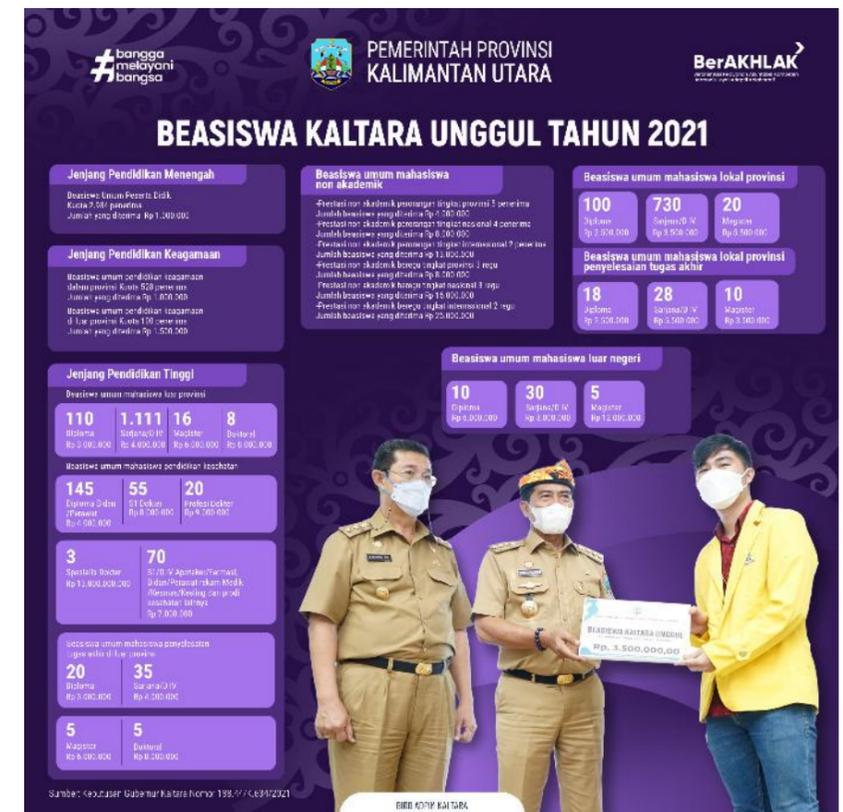
Dalam penyalurannya, beasiswa ini diklasifikasikan menjadi beasiswa umum dan beasiswa khusus. Beasiswa umum diberikan secara stimulan kepada peserta didik keagamaan, maupun mahasiswa yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar daerah termasuk di luar negeri dengan maksud membantu sebagian kebutuhan pendidikan selama 1 tahun dan tidak wajib diperpanjang. Sedang beasiswa khusus diberikan kepada peserta didik keagamaan, maupun mahasiswa Kaltara sebagai tindak lanjut kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga atau penyelenggara pendidikan selama jangka waktu yang ditentukan. *

Pemberian beasiswa merupakan salah satu instrumen meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan jalan memberi kesempatan kepada anak usia sekolah atau pun masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya.

Tahun 2021 kemarin, Pemerintah Provinsi (Pemprov Kaltara) menggelontorkan program Beasiswa Kaltara Unggul terhadap 6.273 penerima yang memenuhi syarat. Beasiswa ini ditujukan kepada peserta didik, peserta didik keagamaan, maupun mahasiswa yang menempuh pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan keagamaan, serta pendidikan tinggi pada satuan pendidikan di dalam maupun di luar Provinsi Kaltara. Penyerahan beasiswa telah dilaksanakan pada 28 Desember 2021 kemarin.

Total nilai beasiswa yang disalurkan mencapai Rp 15 miliar. Menurut Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum, jumlah beasiswa tersebut masih belum cukup dibanding animo dan kebutuhan siswa, pelajar, dan mahasiswa Provinsi Kaltara. Keterbatasan anggaran akibat *refocusing* penyebab masih minimnya nilai beasiswa yang digelontorkan.

"Kita terus mengusahakan agar penyaluran Beasiswa Kaltara Unggul dapat merata dan ada bagi siswa di setiap sekolah. Kita berharap ke



Dorong Pemerataan Fasilitas Sekolah

Salah satu persoalan bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ialah rendahnya kualitas sarana dan prasarana fisik pendidikan terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Hal ini berkaitan dengan gedung sekolah banyak tidak layak huni, tidak tersedia media belajar yang baik, serta tidak tersedia perpustakaan bagi siswa. Kondisi demikian terutama dijumpai di wilayah-wilayah perbatasan.

Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum menegaskan, fasilitas pendidikan menjadi faktor penting di dalam proses pendidikan di Provinsi Kaltara. Dengan fasilitas yang baik dan mendukung akan mempermudah para pengajar menyampaikan materi pembelajaran dan ini juga mempermudah siswa untuk mengerti tentang materi yang disampaikan.

Untuk itu, di masa pemerintahan Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum dan Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si konsen pada pemerataan pemenuhan fasilitas sekolah, khususnya satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) agar memiliki buku pelajaran dan referensi yang sama dan lengkap. Dalam satu tahun terakhir, sejumlah sekolah telah dibangun fasilitas laboratorium, pemenuhan komputer, serta rehabilitasi maupun pembangunan ruang kelas dan ruang guru.

"Sebagai beranda terdepan negara sudah kawasan perbatasan Provinsi Kaltara mempunyai fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang memadai termasuk dari program pendidikan gratis dengan diberikannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi masyarakat yang tidak mampu. Hingga saat ini, permasalahan fasilitas dan sarana prasarana infrastruktur pendidikan terus kita benahi demi meningkatkan mutu pendidikan," tutur Gubernur.

Selain fasilitas, Gubernur dan Wakil Gubernur juga berupaya keras mengatasi kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan. Diyakininya, pembelajaran merupakan titik sentral dari sebuah proses pendidikan dan keberadaan guru juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan. Maka itu, selain diisi dengan tenaga honorer atau tenaga kontrak juga diupayakan pemenuhannya melalui perekrutan guru formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pemprov Kaltara juga mendorong pemenuhan kesejahteraan guru. Sebab banyak guru yang enggan mengajar di daerah perbatasan yang notabene adalah kawasan daerah terpencil dan tertinggal. Seringkali hanya bertahan selama



Foto: Dokpim Kaltara/Khair



Foto: Dokpim Kaltara/Reqi

CAPAIAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TAHUN 2021:

• Ruang kelas baru yang dibangun	2 ruang
• Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU yang dibangun	2 ruang
• Pembangunan ruang laboratorium Biologi	4 ruang
• Pembangunan ruang laboratorium Fisika	5 ruang
• Pembangunan ruang laboratorium Kimia	1 ruang
• Pembangunan ruang laboratorium komputer	1 ruang
• Pembangunan ruang laboratorium Bahasa	2 ruang
• Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	2 ruang
• Pembangunan Sertak dan Utilitas	63 ruang
• Rehabilitasi ruang sekolah	42 ruang
• Rehabilitasi ruang guru/kepala sekolah/TU	6 ruang
• Rehabilitasi laboratorium Fisika	1 ruang
• Rehabilitasi laboratorium Kimia	1 ruang
• Rehabilitasi laboratorium Komputer	1 ruang
• Rehabilitasi perpustakaan sekolah	2 ruang
• Rehabilitasi Sarpras dan Utilitas sekolah	9 unit
• Jumlah mebel sekolah disediakan	72 paket
• Jumlah siswa yang menerima perlengkapan peserta didik	1300 siswa
• Jumlah alat praktikum dan peraga disediakan	12 paket
• Jumlah sekolah yang menerima biaya personal peserta didik	20.234 siswa
• Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan kurikulum dan penilaian	66 sekolah
• Jumlah sekolah yang dievaluasi	66 sekolah
• Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan dan pengembangan karakter	66 sekolah
• Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	20.234 siswa
• Jumlah mebel sekolah yang dipelihara	62 paket

CAKUPAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS (SLB) TAHUN 2021

• Jumlah ruang kelas baru yang disediakan	4 ruang
• Jumlah sarana prasarana dan utilitas yang dibangun	4 unit
• Jumlah ruang kelas sekolah yang dilakukan rehabilitasi	2 ruang
• Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang dilakukan rehabilitasi	3 ruang
• Jumlah sarana prasarana dan utilitas sekolah yang dilakukan rehabilitasi	1 ruang
• Jumlah mebel sekolah yang disediakan	14 paket
• Jumlah perlengkapan perlengkapan peserta didik yang disediakan	520 siswa
• Jumlah alat praktik dan peraga peserta didik yang disediakan	2 paket
• Jumlah penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik yang diselenggarakan	1547 siswa
• Jumlah pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa yang dilakukan pembinaan	15 sekolah
• Jumlah pengembangan karir: pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus yang dikembangkan	15 sekolah
• Jumlah pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah pendidikan khusus yang dilakukan pembinaan	15 sekolah
• Jumlah siswa penerima dana BOS sekolah pendidikan khusus yang dikelola	485 siswa
• Jumlah mebel sekolah yang dipelihara	15 paket

beberapa tahun, lalu mengajukan pindah dengan berbagai macam alasan.

"Kesejahteraan guru yang mengajar di kawasan perbatasan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan," tuturnya.

Dalam setahun terakhir dan ke depan, Gubernur dan Wakil Gubernur berupaya meningkatkan budaya pendidikan. Di beberapa daerah perbatasan, kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan masih rendah. Mereka lebih memilih untuk bekerja dibanding melanjutkan pendidikan. Faktor sosial yang berkaitan dengan kultur masyarakat, baik yang berupa pandangan, adat istiadat dan kebiasaan lainnya yang melekat di dalam suatu kelompok masyarakat, seringkali menjadi faktor penghambat bagi anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

CAPAIAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TAHUN 2021

• Jumlah ruang praktik siswa dibangun	9 ruang
• Jumlah ruang laboratorium yang dibangun	12 ruang
• Jumlah sarana yang dibangun di sekolah	6 paket
• Jumlah ruang kelas sekolah yang direhabilitasi	59 ruang
• Jumlah ruang guru/ kepala sekolah/TU yang direhabilitasi	17 ruang
• Jumlah mebel sekolah yang disediakan	21 paket
• Jumlah alat praktik dan peraga peserta didik yang disediakan	16 paket
• Jumlah biaya personal peserta didik yang disediakan dan ujian di sekolah	10.390 siswa
• Jumlah penyelenggaraan proses belajar dan ujian di sekolah	70 sekolah
• Jumlah sekolah yang dilakukan evaluasi	32 sekolah
• Jumlah kegiatan minat, bakat dan kreativitas yang dilaksanakan	32 sekolah
• Jumlah pembinaan kelembagaan dan manajemen SMK yang dilakukan pembinaan	32 sekolah
• Jumlah penerima dana BOS SMK yang dikelola	10.252 siswa
• Jumlah mebel sekolah yang dipelihara	66 paket

"Banyak para orangtua siswa yang lebih memilih untuk memperkerjakan anak-anak usia sekolah guna membantu kehidupan ekonomi keluarga. Menurunkan angka putus sekolah dan partisipasi pendidikan di kawasan perbatasan tentu sangat membutuhkan sebuah upaya yang dapat memperluas akses masyarakat agar dapat mengerti dan memahami tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka," tutur Gubernur.

Dan, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor Kaltara Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Program Wajib Belajar mengamanatkan masyarakat yang memiliki anak usia 15 tahun sampai dengan 18 tahun bertanggungjawab mengikutsertakan anaknya pada program wajib belajar pendidikan menengah. *

Rp 100 M Dana Revitalisasi 2022

Sebanyak Rp 100 miliar dana disiapkan untuk meneruskan program revitalisasi sekolah pada 2022 ini. Dana revitalisasi yang cukup besar tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan dari pemerintah (pusat). Sama seperti tahun 2021, revitalisasi sekolah mencakup perbaikan ruang kelas baru, pembangunan laboratorium, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.

Anggaran pada 2022 ini lebih besar dibanding anggaran pada 2021 yang cukup Rp 85 miliar. Sehingga cakupan revitalisasi sekolah dapat menjangkau wilayah yang lebih luas. Kriteria sekolah penerima bantuan ditentukan oleh pemerintah melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masing-masing sekolah.

DAK Fisik Pendidikan ini dipastikan ikut menjangkau rehabilitasi sekolah di wilayah perbatasan agar fasilitas pendidikan terutama untuk sekolah-sekolah di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) terjadi pemerataan. *

Pertanian 'Senjata' Pemulihan Ekonomi

Prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) 2021-2026 salah satunya ialah penguatan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas, dan jaminan perlindungan kepada petani, nelayan dan petani tambak di setiap kabupaten/kota. Prioritas pembangunan ini merupakan pelaksanaan dari misi "Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota".

Revitalisasi pembangunan pertanian Provinsi Kaltara dalam arti luas termasuk perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, serta perikanan sungai dan laut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi wilayah kabupaten/kota bagi kemajuan dan kemandirian perekonomian daerah; meningkatkan rantai nilai produksi, pengolahan dan perdagangan hasil pertanian; menjamin pemenuhan kebutuhan pangan bagi penduduk yang jumlahnya terus bertambah; menguatkan ketahanan daerah; serta memasok bahan pangan bagi daerah lain.

Langkah yang tengah dilakukan dalam revitalisasi pembangunan pertanian antara lain meningkatkan pasokan dan mutu benih dan bibit unggul, meningkatkan kapasitas petani, nelayan dan petani tambak; memperluas akses petani terhadap permodalan dan insentif pertanian; membangun prasarana dan sarana pertanian; menerapkan pertanian modern dengan mengembangkan manajemen agroindustri dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; memperluas jaringan promosi, pemasaran dan perdagangan berbasis teknologi informasi; serta meningkatkan kerjasama dan kemitraan investasi pertanian.

Wakil Gubernur Kaltara Dr. Yansen, TP M.Si mengemukakan, pemerintah kabupaten/kota diharapkan ikut mendorong sektor pertanian dan jasa dalam rangka memulihkan perekonomian daerah dan nasional. Dua sektor itu dinilai mampu menjadi 'senjata' menghadapi situasi global akibat pandemi Covid-19.

Dr. Yansen TP M.Si menginstruksikan OPD terkait membuat rencana induk atau masterplan pengembangan infrastruktur kawasan pertanian di sejumlah wilayah. Pengembangan infrastruktur tersebut mulai dari jaringan jalan, jembatan, irigasi, serta pendukung lainnya. Ia optimistis Provinsi Kaltara sangat berpeluang menjadi andalan pertanian nasional.



Foto: Dokpim Kaltara/Khair



Foto: Dokpim Kaltara/Reqi

"Kita melihat lahan pertanian di Jawa sudah hampir habis. Di Sulawesi juga kian menipis. Dan yang berpeluang untuk menjadi penopang pertanian nasional adalah Kaltara. Apalagi kita ketahui bersama, Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi potensi besar bagi kita untuk menopang dari sektor pertaniannya," tuturnya. *



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Realisasi Program Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan 2021

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

- Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 2 Lumbung
Rp 140.554.924,00
- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 2 Unit
Rp 88.075.922,00

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, 25 Kelompok
Rp 110.093.380,00
- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan, 12 Dokumen
Rp 110.093.380,00

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan, 15000 Ton
Rp 331.560.450,00
- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan, 2591 Batang
Rp 336.987.000,00
- Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, 15 Kelompok
Rp 77.222.654
- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumberrnya dari Daerah Provinsi Lain, 14 Ekor
Rp 179.848.576,00

Sumber: Bappeda & Litbang Kalimantan Utara

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

- Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 1000 Kasus
Rp 262.707.095,00
- Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi, 200 Ekor
Rp 24.990.000,00
- Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan 20 Orang
Rp 59.395.000,00
- Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 12 Pelaku Usaha
Rp 14.580.000,00
- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani 4 kali
Rp 101.433.160,00



BIRO ADPIM KALTARA

Memantapkan Akses dan Cadangan Pangan

Salah satu kondisi yang diprioritaskan sebagai sasaran dan kebijakan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) adalah mantapnya ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Dari sejumlah indikator menunjukkan bahwa ketahanan pangan di provinsi ini belum cukup mantap atau nilainya masih rendah. Beberapa sebab utama yang mempengaruhi ketahanan pangan adalah ketersediaan, keterjangkauan, diversifikasi dan pembinaan pengawasan pangan. Daerah-daerah pedalaman khususnya mempunyai kerawanan pangan yang lebih tinggi, dalam arti keterjangkauan, walaupun ketersediaan pangan lokal relatif lebih memadai.

Dalam rangka mengantisipasi rendahnya ketahanan pangan yang disebabkan ketersediaan pangan yang cenderung tidak stabil, Pemprov Kaltara melalui berbagai kebijakan melakukan langkah-langkah penguatan cadangan pangan demi mencapai angka cadangan pangan sesuai ketentuan rata-rata. Selain itu, Pemprov juga terus mendorong peningkatan produksi pertanian.

Melalui instansi terkait, Pemprov Kaltara menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi sebanyak 4 unit. Selain itu, menyediakan infrastruktur lumbung pangan sebanyak 2 lumbung, serta menyediakan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya sebanyak 2 unit. Hingga Februari 2022, cadangan pangan Pemprov Kaltara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) mencapai 149,8 ton.

Terhadap luas panen padi dan produktivitas, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara, luas panen padi pada 2021 kurang lebih sebesar 11.057,04 hektar, mengalami kenaikan sebanyak 1.173,99 hektar atau 11,88 persen dibandingkan 2020 yang sebesar 9.883,05 hektar. Adapun produksi padi 2021 mencapai 38.164,61 ton GKG (Gabah Kering Giling) atau mengalami kenaikan sebanyak 4.590,33 ton atau 13,67 persen dibandingkan 2020 yang sebesar 33.574,28 ton. Jika potensi produksi padi pada 2021 dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi beras pada 2021 diperkirakan sebesar 22.508,87 ton, mengalami kenaikan sebanyak 2.707,29 ton atau 13,67 persen dibandingkan 2020 yang sebesar 19.801,58 ton.

Selain peningkatan cadangan pangan dan tingkat produksi panen, Pemprov Kaltara juga konsentrasi pada penguatan infrastruktur pemasaran paska panen dalam rangka mengantisipasi kelebihan produksi dibanding



kebutuhan lokal. Keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat juga terus dibenahi dengan membangun dan memperbaiki infrastruktur yang berkesesuaian dengan kemampuan anggaran. Keterjangkauan yang dimaksud adalah dari sisi daya beli dan dari sisi ketersediaan. Perbaikan infrastruktur khususnya diharapkan mampu mengatasi sulitnya pengangkutan bahan makan non lokal yang pada gilirannya harga relatif rendah atau setara dengan rerata harga daerah lain di tanah Air.

Langkah lainnya ialah memanfaatkan sumber pangan lainnya sebagai pelengkap dalam pola pangan, tidak bergantung pada beras semata. Pemprov Kaltara di bawah kepemimpinan Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H.,M.Hum dan Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si terus mengkampanyekan diversifikasi pangan agar mulai membudaya di masyarakat, minimal di lingkungan pemerintah daerah terlebih dahulu.

Selain itu ketahanan pangan menjadi rentan oleh karena bencana antara lain akibat kegagalan panen yang hal ini terjadi karena banjir/kegenangan, kekeringan atau akibat terjadi

eksplosi hama dan penyakit tanaman. Ketahanan pangan yang rentan dapat mengakibatkan bencana yang tidak pernah diperkirakan seperti halnya yang saat ini terjadi dengan adanya pandemi Covid-19. Untuk itu, didasari data kependudukan dan data kebencanaan di suatu wilayah, Pemprov Kaltara berupaya terus melakukan penguatan cadangan bahan pangan untuk periode kritis yang diprediksi terjadi.

"Lumbung pangan kita galakkan agar menjadi suatu dukungan dalam memperkuat cadangan pangan masyarakat sebagai antisipasi terjadinya kerawanan pangan akibat gangguan produksi seperti bencana alam dan nonalam, apalagi seperti sekarang dalam situasi pandemi Covid-19," tutur Gubernur. *

Era Bangkitnya Pangan Lokal

Kalimantan Utara (Kaltara) dikenal dengan keanekaragaman hayatinya. Salah satunya ialah potensi pangan lokal yang cukup beragam di provinsi ini. Pemprov Kaltara berupaya mewujudkan penganekaragaman pangan lokal sebagai salah satu wujud ketahanan dan kemandirian pangan serta memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kekayaan ini perlu dikelola secara intensif dan ekstensif demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menumbuhkembangkan kesadaran dalam pemanfaatan dan konsumsi pangan lokal. Untuk itu, pengembangan pangan lokal di Provinsi Kaltara telah dituangkan dalam kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 yang ditandatangani Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H.,M.Hum pada 17 Juni 2021.

Dalam peraturan gubernur ini dijabarkan bahwa pengembangan pangan lokal ditujukan untuk meningkatkan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan segar, olahan, maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat. Cakupannya meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi, serta gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Kehadiran peraturan gubernur ini juga ditujukan memberi dorongan terhadap peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral yang berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Yang tidak kalah pentingnya, peraturan gubernur ini menjadi instrumen penguatan dan peningkatan partisipasi pemerintah daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Ruang lingkup pengembangan pangan lokal mencakup sistem produksi dan ketersediaan, distribusi, keamanan, pemanfaatan, mutu dan gizi, label, ketahanan pangan, penganekaragaman konsumsi, sosialisasi dan promosi, peran serta masyarakat, monitoring dan evaluasi, kerjasama, dan pendanaan.



Foto: Dokpim Kaltara/Khair



Foto: Dokpim Kaltara/Khair

Dalam hal pemanfaatan pangan lokal berdasarkan peraturan gubernur ini, masyarakat diminta memprioritaskan konsumsi pangan lokal. Artinya, harus disajikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan ataupun pertemuan yang diselenggarakan dalam lingkup pemerintah daerah, instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha (industri jasa boga, perhotelan, restoran), dan seluruh kegiatan masyarakat di Provinsi Kaltara. *

Tingkatkan Simpul Konektivitas Wilayah

Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kalimantan Utara (Kaltara) secara bertahap melanjutkan pembangunan jalan ruas dalam kota maupun ruas jalan perbatasan. Tujuannya, meningkatkan konektivitas antar wilayah atau membuka akses daerah terisolir, juga sebagai pemerataan aksesibilitas pembangunan dan pelayanan publik.

Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H.,M.Hum menyatakan jaringan jalan merupakan infrastruktur yang memiliki peran vital baik seagai urat nadi perekonomian, juga menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Sebab Provinsi Kaltara adalah salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia.

"Pembangunan jaringan jalan yang kita lakukan harapannya mampu memperlancar gerak perekonomian antar daerah di Kaltara, khususnya kemudahan aksesibilitas masyarakat di kawasan perbatasan," tutur Gubernur.

Sesuai kapasitas anggaran daerah, sepanjang tahun 2021, berdasarkan catatan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Kaltara, sejumlah ruas jalan kewenangan provinsi dibangun sekaligus ditingkatkan. Antara lain :

- Pembangunan/pemeliharaan Jalan Durian Tanjung Selor (1,1 km) Rp 4,6 M,
- Ruas Tanah Kuning – Mangkupadi (3,5 km) Rp 19,5 M,
- Ruas Long Bawan – Lembudud (2,06 km) Rp 20,5 M,
- Coastal Road Nunukan: Mansapa - Pelabuhan Tunon Taka (2,3 km) Rp 4,3 M,
- Jalan menuju Air Terjun Sekaduyan Taka (1,8 km) Rp 1,8 M,
- Ruas Selimau I - Selimau III Tanjung Selor (1,04 km) Rp 2,3 M,
- Lingkar Pulau Nunukan: Binusan - Pelabuhan Ferry Sei Jepun (6 km) Rp 4 M,
- Ruas Lembudud - Long Layu (34,9 km) Rp 5,1 M,
- Long Layu - Pa Upan (30,5 km) Rp 4,7 M,
- Ring Road Malinau: Simpang 4 Pusat Pemerintahan - Punan Setarap (1,2 km) Rp 4,8 M,
- jalan poros Mapolda Kalimantan Utara - Mako Brigif 24/Bulungan Cakti (2,3 km) Rp 2,6 M.

Secara keseluruhan, jalan perbatasan di Kaltara sepanjang 992,35 km terdiri dari jalan paralel perbatasan sepanjang 614,55 km dan akses perbatasan 377,8 km. Hingga saat ini dari 614,55 km jalan paralel perbatasan Kaltara, tersisa sepanjang 57 km yang belum tembus dengan dan 27,05 km yang belum tembus untuk jalan akses perbatasan.

PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN JALAN STATUS KEWENANGAN PROVINSI 2021

- Jalan Durian Tanjung Selor (1,1 km) Rp 4,6 Miliar
- Jalan Tanah Kuning – Mangkupadi (3,5 km) Rp 19,5 Miliar
- Jalan Long Bawan – Lembudud (2,06 km) Rp 20,5 Miliar
- Jalan Coastal Road Nunukan: Mansapa - Pelabuhan Tunon Taka (2,3 km) Rp 4,3 Miliar
- Jalan menuju Air Terjun Sekaduyan Taka (1,8 km) Rp 1,8 Miliar
- Selimau I - Selimau III Tanjung Selor (1,04 km) Rp 2,3 Miliar
- Lingkar Pulau Nunukan: Binusan - Pelabuhan Ferry Sei Jepun (6 km) Rp 4 Miliar
- Lembudud - Long Layu (34,9 km) Rp 5,1 Miliar
- Long Layu - Pa Upan (30,5 km) Rp 4,7 Miliar
- Ring Road Malinau Simpang 4 Pusat Pemerintahan - Punan Setarap (1,2 km) Rp 4,8 Miliar
- Jalan Trans Kalimantan - Tideng Pale (0,4 km) Rp 2 Miliar
- Jalan Gunung Selatan Kota Tarakan (0,3 km) Rp 1,2 Miliar
- Jalan Gajah Mada Kota Tarakan (0,9 km) Rp 4,4 Miliar
- Jalan Poros Mapolda Kalimantan Utara - Mako Brigif 24/Bulungan Cakti (2,3 km) Rp 2,6 Miliar
- Pembangunan Jembatan Girdar Tanah Kuning - Mangkupadi Rp 445,7 Miliar

Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	km	Rp
Panjang Jalan yang Dilebar	0,4	Rp 4,725,420,000
Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,4	Rp 4,440,000,000
Panjang Pemeliharaan Berkala Jalan	3,88	Rp 1,638,222,400
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	7,6	Rp 3,038,880,000
Jumlah Jembatan yang dipelihara	1 unit	Rp 445,700,000

Sumber: Bappeda Litbang, Kalbar, Kalimantan Utara

BIRO PUPR KALTARA

Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembangunan ruas jalan di Provinsi Kaltara juga ditopang oleh pemerintah (pusat). Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada tahun 2021 menganggarkan sebesar Rp 247 miliar untuk pembangunan ruas jalan perbatasan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk

- Pembangunan ruas Jalan Long Boh-Metulang -Long Nawang sepanjang 6,5 km, dan Jalan Long Boh - Metulang - Long Nawang 2 dengan total panjang 21,5 km.
- Selanjutnya adalah pembukaan hutan ruas Long Boh - Metulang yang belum tembus sepanjang 3,5 km, Jalan Long Kemuat-Langap (3,7 km), dan pemeliharaan rutin perbatasan (312,3 km).

Selain jalan perbatasan, anggaran 2021 Kementerian PUPR juga digunakan untuk melanjutkan pembangunan akses perbatasan di wilayah Kaltara sebesar Rp 468 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan Jalan Malinau-Semamu dengan target 2 km, Jalan Malinau-Semamu 1 (3,2 km), Jalan Long Semamu – Long Bawan (13,66 km), dan Jalan

Long Nawang (3,9 km).

Pekerjaan pengaspalan diprioritaskan pada area yang sudah ada permukiman atau padat penduduk serta terdapat fasilitas umum seperti Puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan. Sementara penggunaan lapisan agregat digunakan pada area yang masih butuh peningkatan lalu lintas harian-nya (LHR).

Kehadiran jalan perbatasan dan akses perbatasan tersebut diharapkan akan membuka keterisolasian wilayah yang sangat membantu masyarakat di kawasan perbatasan. Dengan meningkatnya konektivitas masyarakat akan terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan. *

Wajah Baru Perbatasan, 4 PLBN Rampung 2023

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyelesaikan pembangunan 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) guna meningkatkan daya saing nasional, pemerataan hasil pembangunan sekaligus mengurangi disparitas, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). Keempat PLBN ditargetkan selesai Desember 2022, yakni PLBN Terpadu Long Nawang di Kabupaten Malinau dan tiga di Kabupaten Nunukan yakni Long Midang, Labang, dan Sei Pancang.

Dikutip dari laman remi kementerian PUPR, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan PLBN tidak hanya bertujuan untuk pos lintas batas negara, namun juga akan didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian kehadiran PLBN akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," kata Menteri Basuki.

Pembangunan PLBN Terpadu Long Nawang telah dimulai pada 3 September 2020 dengan progres 33,49 persen dan ditargetkan selesai 25 Desember 2022. Anggaran pembangunan PLBN bersumber dari APBN senilai Rp 225,3 miliar. PLBN ini berada di Kabupaten Malinau yang berbatasan langsung dengan Long Busang di Sarawak, Malaysia. Ruang lingkup pekerjaan yang tengah diselesaikan meliputi bangunan utama, gudang, mess pegawai, tower air, gerbang Tasbara, masjid, foodcourt, power house dan plumbing (MEP), lansekap, dan bangunan penunjang.

Selanjutnya PLBN Terpadu Long Midang di Kabupaten Nunukan mulai dikerjakan pada 8 Oktober 2020 dan direncanakan selesai 25 September 2023 dengan progres fisik 5,63 persen. Pekerjaan yang dilaksanakan hampir sama dengan PLBN Terpadu lain berupa bangunan inti dan fasilitas penunjang lainnya dengan anggaran sebesar Rp 200,7 miliar.

Pekerjaan pembangunan PLBN Terpadu Long Midang mengalami beberapa kendala di antaranya akses mobilisasi peralatan dan material melalui jalur darat yang belum tersedia dan sempat mengalami penurunan permukaan tanah dan longsor di lereng sebelum kegiatan land clearing dan galian.

PLBN Terpadu lainnya di Kabupaten Nunukan adalah PLBN Labang yang dikerjakan sejak 25 November 2020 dan ditargetkan selesai 14



Foto: Dokpim Kaltara/Khair

Desember 2022. Biaya pembangunan PLBN ini sebesar Rp210,7 miliar dengan progres konstruksi 27,95 persen.

Adapun pekerjaan yang tengah diselesaikan meliputi bangunan pemeriksaan, mess pegawai, kantor pegawai, tower air, rumah pompa (GWT), power house, tambatan perahu, Tempat Pembuangan Sampah (TPS), mekanikal elektrik dan plumbing (MEP), lansekap, dan bangunan penunjang.

Terakhir PLBN Terpadu Sei Pancang atau biasa disebut Sei Nyamuk yang juga berada di Kabupaten Nunukan. PLBN ini berada Kecamatan Sebatik Utara yang dapat diakses menggunakan speed boat dari Kota Tarakan dengan waktu tempuh sekitar 3 jam.

PLBN Terpadu Sei Pancang memiliki luas lahan 68.169 m2 dibangun zona inti dan zona pendukung yang meliputi bangunan utama setinggi 3 lantai seluas 5.613 m2, mess pegawai setinggi 2 lantai dengan luas 1.904 m2, dan Wisma Indonesia setinggi 2 lantai seluas 1.888 m2.

Pembangunan PLBN ini mulai dikerjakan pada 24 Februari 2020 dengan progres 82,1persen dan ditargetkan selesai 13 Juni 2022. PLBN Sei Pancang juga mengembangkan konsep infrastruktur hijau melalui penataan lansekap, penanaman pohon dan rumput serta roof garden untuk bangunan bertingkat dengan total anggaran konstruksi sebesar Rp 248,58 miliar.

Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H.,M.Hum sebelumnya pada 20 November 2021 meninjau pembangunan PLBN Labang, Kecamatan Lumbis Pansiangan. Gubernur berharap pembangunan PLBN yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dapat selesai sesuai target.

*"Kami juga berharap selama pembangunan hingga operasional PLBN nanti masyarakat setempat ikut dilibatkan. Pada dasarnya kami sangat berterimakasih dan mengapresiasi pemerintah (pusat) membangun 4 PLBN di Kaltara. Hal ini menjadi kebijakan yang sangat tepat dan besar manfaatnya untuk masyarakat Kaltara yang berbatasan dengan Malaysia," tutur Gubernur. **

Bangun Pelabuhan Regional Percepat Distribusi Logistik



Foto: Dokpim Kaltara/Johan

Pelabuhan sebagai infrastruktur transportasi laut berperan penting dan strategis untuk menopang pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan daerah karena merupakan bagian mata rantai dari sistem transportasi maupun logistik.

Untuk itu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum sejak awal mendorong percepatan pembangunan pelabuhan regional di Kabupaten Bulungan. Orang nomor satu di Provinsi Kaltara ini dalam beberapa kali kesempatan melakukan survei langsung rencana lokasi pelabuhan di Sei Manjuaring, Salangketi, Kecamatan Tanjung Palas Tengah.

Gubernur telah menginstruksikan Dinas Perhubungan bergerak cepat menyusun kajian studi kelayakan, Rencana Induk Pelabuhan (RIP), Survey Investigation Design (SID), Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), serta pembebasan lahan sekitar rencana lokasi pembangunan.

"Setelah tahapan-tahapan itu dilaksanakan, kemudian masuk tahap pembangunan fisik. Kita harapkan tahun 2023 sudah masuk tahap itu (fisik). Sehingga semua kajian atau dokumen perencanaan kita targetkan bisa tuntas tahun ini (2022) di instansi teknis," tutur Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum.

Pembangunan pelabuhan regional baru di Bulungan cukup penting. Mengingat pelabuhan Kayan I Tanjung Selor saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan ruang kota. Pelabuhan ini juga dihadapkan masalah pendangkalan sungai yang menyebabkan masa tunggu bongkar muat barang memakan waktu lama yang pada gilirannya berdampak naiknya harga barang.

Maka itu, kehadiran pelabuhan regional yang baru diharapkan memperlancar arus distribusi barang dari dan ke ibu kota Kaltara khususnya, yang kemudian diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Kaltara menyebut di Sei Manjuaring kemungkinan besar dapat dibangun hingga empat dermaga sandar kapal. Selain itu arus sedimentasinya dinilai relatif kecil sehingga akan mempercepat proses bongkar muat. Alur sungai di kawasan itu juga tidak berkelok sehingga memudahkan kapal melakukan manuver.

Rencana pemindahan pelabuhan barang ini bukanlah yang pertama kalinya. Pada 2015 lalu, pemerintah telah mencanangkan pemindahan pelabuhan barang ke Pesawan, Tanjung Selor. Namun saat disurvei langsung oleh Gubernur, ia memutuskan memindahkannya lagi ke lokasi yang lebih layak.

Dari hasil koordinasi antara Gubernur dengan



Foto: Dokpim Kaltara/Johan

Menteri Perhubungan beserta Dirjen Perhubungan Laut dan ASDP, pembangunan fisik pelabuhan di Sei Manjuaring, dapat dibiayai dan dilaksanakan oleh kementerian tersebut jika dokumen perencanaan dan persoalan lahan telah dituntaskan oleh Pemprov Kaltara.

"Maka itu, kita mendorong percepatan penyelesaian dokumen perencanaan, amdal, sampai tahap pembebasan lahan. Setelah itu, pembiayaan pembangunan fisiknya akan ditangani oleh Kementerian Perhubungan," tutur Gubernur. *

Dorong Instansi Vertikal Segera Berkantor



Foto: Dokpim Kaltara/Khair

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendukung kehadiran instansi vertikal untuk berkantor di Kaltara, khususnya di Kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum dalam beberapa kali kesempatan menyebut sejumlah instansi vertikal sudah bakal berdiri di Tanjung Selor, Bulungan, Ibu Kota Provinsi Kaltara.

Gedung instansi yang segera hadir ialah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengadilan Tinggi Agama, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Stasiun TVRI Kaltara. Pembiayaan pembangunan fisik gedung ditanggung masing-masing instansi vertikal. Lahannya disiapkan oleh Pemprov Kaltara melalui skema hibah.

"BPKP sudah proses pematangan lahan. Sedang TVRI tengah proses lelang," tutur Gubernur. Luas kawasan pusat pemerintahan di KBM Tanjung Selor mencapai 500 hektare. Dengan komitmen instansi vertikal dan pembangunan kantor perwakilan di kawasan itu akan mempercepat progres pembangunan kawasan tersebut.

Dalam waktu dekat pula akan dimulai pula pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara melalui skema tahun jamak atau multiyears dalam kurun waktu tahun anggaran 2022 sampai 2023. Tahap awal (2022) dikurcurkan Rp 120 miliar dari



Foto: Dokpim Kaltara/Johan

APBD atau 20 persen dari alokasi anggaran yang disiapkan selama 2 tahun. Anggaran itu digunakan untuk pekerjaan konstruksi fisik pondasi, rangka bangunan, lanskap dan lahan parkir. Tahap kedua (2023) dialokasikan Rp 110 miliar untuk pengerjaan tahap akhir serta kelengkapan meubelair.

Tahun 2022 ini, Pemprov Kaltara juga mulai menggarap perencanaan gedung kantor KPU dan kantor Bawaslu Provinsi Kaltara. Sebelumnya, Pemprov Kaltara juga telah mengibahkan lahan ke Kantor Perwakilan (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Kaltara, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kaltim-Kaltara, Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara, dan Komando Resor Militer (Korem) 092/Maharajaila.

Selain memacu perealisasi KBM Tanjung Selor, dorongan kehadiran instansi-instansi vertikal diharapkan menjadi instrumen peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kaltara dalam rangka mewujudkan Kaltara Berubah, Maju, dan Sejahtera. *

Memperkuat Peran Kabupaten/Kota



Foto: Dokpim Kaltara/Khair

Harmonisasi antara pemerintah daerah di kabupaten kota dengan pemerintah provinsi, kini menjadi prioritas di tahun kedua masa kepemimpinan Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum dan Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si.

Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si menilai, jalinan hubungan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota berjalan baik maka proses pelaksanaan roda pemerintahan akan maksimal. Dan dapat mencapai visi dan misi bersama.

"Saya pikir itu modal awal. Sekarang kita sudah melakukannya. Ini bisa kita nilai sebagai keberhasilan," tutur Wagub.

Salah satu bukti keberhasilan itu ialah masuknya Provinsi Kaltara sebagai daerah paling bahagia di Indonesia. Berdasarkan Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) tahun 2021 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Kaltara menempati posisi kedua tertinggi, setelah Maluku Utara.

"Tidak mungkin serta merta kita menjadi nomor dua, kalau tidak ada kebijakan yang diberikan pimpinan. Sehingga memberi ruang tumbuhnya semangat masyarakat," tuturnya.

Ia mengklaim, hal ini sekaligus membuktikan indikator capaian kerja Pemprov Kaltara di

bidang lainnya seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta keamanan. Karena beberapa bidang tersebut juga menjadi indikator penilaian dalam survey SPTK.

Wakil Gubernur pun menilai, perbaikan dari segala sisi itu terbentuk berdasarkan kebijakan pemerintah daerah. Salah satunya ialah menumbuhkan kearifan lokal dengan kebijakan penggunaan produk dan pangan lokal. Dari kebijakan itu, ada banyak pengaruh positif. Mulai dari terciptanya lapangan kerja, munculnya sumber pendapatan, dan meningkatnya daya beli masyarakat.

"Saya pikir, ini yang secara perlahan nanti akan menjadi lebih baik. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, satu tahun ini sudah terbentuk," jelasnya.

Keberhasilan pemerintahan dalam satu tahun terakhir juga ialah menurunkan angka kemiskinan daerah. Ia menyebut, hal itu karena kebijakan pemerintah mendorong masyarakat dengan taraf ekonomi ke bawah bisa mendapatkan penghasilan dan lapangan kerja.

Data terakhir yang dirilis BPS Kaltara, jumlah penduduk miskin di provinsi ini mengalami penurunan. Per September 2021 persentase penduduk miskin di Kaltara adalah 6,83 persen atau sebanyak 49,49 ribu penduduk.

Angka itu menurun sebesar 0,53 persen poin. Dibandingkan pada periode Maret 2021. Dimana angka kemiskinan mencapai 7,36 persen atau sebanyak 52,86 ribu penduduk. Artinya jumlah penduduk miskin berkurang 3,4 ribu jiwa dibanding periode Maret 2021.

Menurunnya angka kemiskinan ini menurut BPS dipengaruhi oleh beberapa fenomena sosial ekonomi. Di antaranya seperti pertumbuhan ekonomi Kaltara yang membaik, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, dan peningkatan pekerja di sektor formal.

Ia melanjutkan, sebagaimana item dalam pendekatan pembangunan Gerakan Kaltara Rumah Kita salah satunya ialah Memajukan Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan gerakan diarahkan untuk menguatkan peran pemerintah kabupaten dan kota dalam menjalankan banyak hal.

Antara lain melaksanakan fungsi pemerintahan, meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik, mengembangkan inovasi, daya saing dan keunggulan daerah di setiap desa/kelurahan dan kecamatan, serta menjamin kesinambungan pembangunan secara berkelanjutan melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pendampingan, dan peningkatan kapasitas oleh perangkat daerah. *

Bangkitkan Gairah Kreatif Kearifan Lokal



Foto: Dokpim Kaltara/Johan

Salah satu kebijakan Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum dan Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si yang paling 'mencolok' adalah dorongan dan penguatan terhadap kebudayaan dan kearifan lokal. Masih hangat dalam ingatan, tiga hari setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 15 Februari 2021, Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum kemudian menginjakkan kaki di Tanjung Selor.

Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang kala itu mengawali agenda sebagai gubernur dengan memberi penyampaian di kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WBBM) Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara di Tanjung Selor, Kamis 18 Februari 2021.

Dalam penyampaiannya, Gubernur langsung meminta semua instansi di Provinsi Kaltara menghidupkan kearifan lokal di berbagai aspek pembangunan. Salah satunya, dalam hal arsitektur pembangunan gedung perkantoran perlu menampilkan unsur kearifan lokal. Ia juga mengimbau semua pegawai instansi pemerintah daerah maupun vertikal mengutamakan kearifan lokal dalam berbusana atau berpakaian.

"Saya ajak seluruhnya untuk mengenakan batik khas Kaltara. Siapa lagi kalau bukan kita. Kapan lagi kalau bukan sekarang," ujarnya.

Perlahan tapi pasti, industri fashion lokal mulai tumbuh. Setiap pengusaha berlomba-lomba menciptakan karya-karya terbaiknya di bidang

busana berbasis sentuhan kearifan lokal Suku Bulungan, Suku Dayak, dan Suku Tidung.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara sampai-sampai mencatat pertumbuhan ekonomi dari kegiatan industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 3,62 persen pada triwulan II 2021.

Pada 14 Juni 2021, Gubernur Zainal A Paliwang kemudian mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Batik Khas Daerah Provinsi Kaltara. Beleid ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melindungi, melestarikan, dan mengembangkan batik khas daerah sebagai karya cipta dan produk kebudayaan masyarakat daerah serta sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

"Dengan penggunaan batik daerah kita proyeksikan batik daerah Kaltara lebih dikenal ke level nasional dan internasional, mendorong produksinya di kalangan perajin lokal, termasuk menajaga daya saingnya, serta sebagai bentuk pelestarian nilai kebudayaan daerah," ujarnya.

Kini, batik daerah Kaltara sudah menjadi barang wajib dikenakan oleh instansi pemerintahan dalam setiap hari Kamis dan Jumat dalam hari kerja. Gubernur juga telah menetapkan tanggal 25 Oktober

adalah Hari Batik Daerah Kaltara. Selain itu, setiap tanggal 25 setiap bulan batik juga wajib mengenakan batik daerah.

Lalu pada 13 September 2021 mengeluarkan edaran penggunaan aksesoris lokal bagi semua ASN dan Non ASN di lingkungan kerja Pemprov Kaltara, dalam rangka mempertegas implementasi Peraturan Gubernur Nomor 21 tahun 2021.

"Diimbau kepada ASN dan non ASN di lingkungan Pemprov Kaltara untuk menggunakan aksesoris berupa penutup kepala, kalung, gelang, tas, dan lain-lain tiap hari Kamis dan Jumat," tulis Gubernur dalam imbauan tersebut. *

Penggunaan Aksesoris Lokal Khas Kalimantan Utara
Bagi ASN dan Non ASN Pemprov Kaltara

Sebagai upaya melestarikan, mempromosikan, dan mengembangkan kearifan budaya serta Perajin Kalimantan Utara, Gubernur Kaltara mengimbau ASN dan Non ASN Pemprov Kaltara untuk menggunakan produk lokal khas Kaltara.

Tanggal 25 setiap bulan
Penggunaan batik khas Kaltara dan Kalimantan Utara

Hari Kamis & Jumat
Penggunaan baju batik khas Kaltara dan aksesoris lokal khas Kaltara, seperti:
- Penutup kepala,
- kalung,
- gelang,
- tas,
- dan lainnya.

Fokus 2023, Industri Berbasis Sumber Daya Lokal

Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 telah diawali, pada Senin 21 Februari. Konsultasi publik ini diresmikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum bersama Wakil Gubernur (Wagub) Dr. Yansen TP, M.Si. Turut dihadiri Bupati/Wali Kota di Kaltara secara daring.

Gubernur menjelaskan, visi pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara 2021-2026 adalah Terwujudnya Provinsi Kaltara yang Berubah Maju dan Sejahtera. Visi tersebut diwujudkan dalam 14 misi yang difokuskan pada 10 prioritas Kaltara, sehingga pada tahun 2023 ditetapkan dengan tema Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal.

Demi mewujudkan tema pembangunan 2023 tersebut, Gubernur beserta pemrov membutuhkan dukungan dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam gerakan Kaltara Rumah Kita, dengan kabupaten/kota merupakan pilar-pilar utama pembangunan provinsi.

Ada dua tantangan dalam RKPD 2023 yaitu potensi berlanjutnya pandemi COVID-19 yang dapat menghambat peningkatan ekonomi dunia yang berdampak pada perekonomian tingkat regional dan daerah. Kedua, adalah keuangan daerah yang cukup terbatas maka dibutuhkan perhatian dari berbagai pihak.



Foto: Dokpim Kaltara/Johan

"Selanjutnya, untuk program kegiatan 2023 harus bisa menjadi instrumen utama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah," lanjutnya.

Gubernur menyebutkan, momentum peletakan batu pertama di Kawasan Tanah Kuning-Mangkupadi oleh Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu dan pembangunan PLTA dapat menarik minat para investor. Dikarenakan, kegiatan tersebut adalah perwujudan prioritas Provinsi Kaltara sehingga untuk kualitas Sumber Daya Alam (SDA) perlu ditingkatkan.

"Tahun ini, kita perlu mempersiapkan tenaga-tenaga yang berasal dari masyarakat dan

pemuda untuk bisa mengisi berbagai keperluan di KIP (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional)," ujarnya.

Kata Gubernur, untuk menyiapkan masyarakat lokal, dalam waktu singkat akan dibuat kursus bahasa Inggris dan bahasa Mandarin secara gratis.

"Kemudian, akan ada universitas negeri yang membuka kelas di Tanjung Selor dengan program D1 untuk menunjang kegiatan-kegiatan di kawasan KIP dengan tujuan tenaga dari masyarakat lokal memiliki potensi dan kemampuan untuk ditempat di proyek strategi nasional," ujarnya.

Para OPD dan pemangku kepentingan diajak untuk mempersiapkan lahan-lahan tidur yang ada di Kaltara supaya dapat dikelola oleh petani-petani.

"Kita tidak perlu mendatangkan sayur-mayur dari

luar Kalimantan untuk men-suport ibu kota negara nanti, kita sebagai masyarakat Kaltara harus siap menyongsong ibu kota negara. Kita harus bangkit dan punya kemauan besar untuk bersaing dengan provinsi-provinsi lain," jelasnya.

Gubernur mengucapkan terima kasih kepada OPD-OPD Pemprov Kaltara dan masyarakat atas kerjasamanya di tahun sebelumnya.

"Banyak capaian yang telah diraih Pemprov Kaltara pada tahun 2021 dikarenakan kerjasamanya pemerintah provinsi dengan masyarakat. Tanpa ada kerjasamanya yang baik, prestasi akan susah kita raih," tuturnya. *

Pacu Target Vaksin Dosis III



Foto: Dokpim Kaltara/Khair

Menekan laju penyebaran COVID-19 di Kalimantan Utara (Kaltara), Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H M.Hum menekankan pentingnya vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan (prokes) pencegahan COVID-19 di seluruh wilayah provinsi ini.

Dalam mencegah penyebaran COVID-19, vaksinasi sangat penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Harapannya, dapat imunitas tercipta dan terhidar dari penularan virus. Di akhir 2021 kemarin, capaian vaksinasi dosis I di Provinsi Kaltara tembus 90 persen dan masuk dalam 10 besar di tingkat nasional.

"Mari kita sama-sama galakan program vaksinasi, saya juga minta masyarakat Kaltara dapat mensukseskan vaksinasi ini. Bagi yang belum vaksin, segera vaksinasi demi tercapainya kekebalan komunal atau herd immunity," jelasnya.

Terkait penyebaran varian Omicron, Gubernur memberi atensi khusus. Setiap kabupaten dan kota diharap memantau perkembangan penyebarannya, termasuk perilaku masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi juga diminta Gubernur terus berkoordinasi dengan jajaran TNI/Polri dalam rangka mengejar target dari vaksinasi booster bagi kelompok lansia. Melalui vaksinasi dosis III masyarakat berusia lanjut dan memiliki

komorbid akan memiliki imunitas lebih kuat dari paparan virus COVID-19.

Pengalaman Provinsi Kaltara yang mampu tembus 10 besar daerah dengan sebaran vaksinasi di atas 90 persen, menjadi modal kuat bagi daerah ini untuk memacu kembali vaksinasi dosis III atau booster.

"Kita harus optimis tren positif itu bisa kita pertahankan dan ditingkatkan. Ini harus kita jaga terus, karena ini berdampak tentunya bagi aktivitas masyarakat dan tentunya akan membawa dampak baik bagi pergerakan ekonomi daerah. Kita harus jaga pertumbuhan ekonomi Kaltara di atas 7 persen," sebutnya.

Surat Edaran bernomor SR.02.06/II/1123/2022, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah menyatakan waktu pelaksanaan vaksinasi booster dapat dilakukan dalam waktu tiga bulan setelah mendapatkan vaksinasi kedua bagi kelompok lanjut usia.

Per tanggal 23 Februari 2022, capaian vaksinasi dosis I Provinsi Kaltara mencapai 91,94 persen atau 501.674 jiwa dari target 545.672 jiwa. Vaksinasi dosis II telah mencapai 71,68 persen atau 391.126 jiwa. Adapun dosis III atau booster mencapai 4,29 persen atau 23.389 jiwa. *

Capaian Vaksinasi COVID-19 di Provinsi Kaltara (Per 23 Februari 2022)

Target:
545.672 Jiwa

Dosis 1:
501.674 jiwa (91,94%)

Dosis 2:
391.126 jiwa (71,68%)

Dosis 3:
23.389 jiwa (4,29%)



Sumber: Kementerian Kesehatan RI.

Subsidi Ongkos Angkut, Solusi Persoalan Konektivitas



Foto: Dokpim Kaltara/Johan

Persoalan konektivitas antarwilayah yang masih rendah, ketersediaan prasarana transportasi yang belum optimal, serta belum optimalnya jaringan jalan perbatasan mendorong Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) menggelontorkan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) penumpang/orang dan SOA barang untuk penerbangan dari ke wilayah pedalaman dan perbatasan di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.

Tahun 2021 kemarin, Pemprov Kaltara menggelontorkan dana subsidi penumpang pesawat perintis sebesar Rp 14 miliar. Anggaran sebanyak itu, dialokasikan untuk melayani penerbangan subsidi di 6 rute terbang. Lalu SOA barang dengan transportasi air dan udara sebesar Rp 8,5 miliar.

Masing-masing SOA tersebut dilaksanakan oleh instansi teknis yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM). Menurut Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum mengatakan, program SOA pada gilirannya diperuntukkan sebagai penggerak mobilitas masyarakat perbatasan yang masih terisolasi dari akses darat. Dengan skema pembiayaan SOA yang dilakukan, harga tiket pesawat dapat ditekan agar lebih terjangkau oleh semua lapisan masyarakat perbatasan.

Dengan kemudahan akses, diharapkan masyarakat dapat menikmati berbagai hal, seperti melanjutkan pendidikan ke kota, berobat ke fasilitas kesehatan yang lebih baik, termasuk dalam menjaga ketahanan persediaan barang pokok, serta membangun ketahanan ekonominya dalam arti luas.

Gubernur juga menjelaskan, SOA angkutan orang dan angkutan barang ini diperuntukkan guna meringankan beban pengeluaran masyarakat terkait perbedaan harga komoditas di beberapa daerah pedalaman dan perbatasan. Adanya angkutan orang dan angkutan barang, masyarakat bisa mendapatkan harga yang sama dengan harga barang di agen atau di perkotaan.

"Kita menekan perbedaan harga. Perbedaan harga boleh, tapi jangan sampai berbeda 100 persen, bahkan lebih karena ini akan berdampak serius bagi kehidupan masyarakat di daerah - daerah yang sulit dijangkau," tuturnya.

Gubernur menegaskan, seiring digelontorkannya subsidi, Pemprov Kaltara saat ini berupaya keras untuk mengatasi persoalan redahnya aksesibilitas di daerah pedalaman dan perbatasan dengan membangun serta meningkatkan prasarana dan jaringan jalan demi membuka keterisolasian wilayah dan disparitas pembangunan.

"Tahun 2022 ini, dengan kapasitas anggaran yang ada, kita akan alokasikan SOA penumpang kurang lebih sebesar Rp 14 miliar," sebut Gubernur. *

Realisasi SOA Penumpang Orang (Udara dan Sungai) APBD Kaltara 2021

Rute Single Engine:
Tanjung Selor – Long Pujungan
Tanjung Selor – Long Alango
Tanjung Selor – Mahak Baru
Malinau – Long Sule
Malinau – Mahak Baru
Malinau – Data Dian
Malinau – Long Pujungan
Malinau – Long Alango

Realisasi Fisik 98% (471 penerbangan),
Realisasi Keuangan 98% (Rp. 5,5 miliar)

Rute Double Engine:
Tanjung Selor – Nunukan
Tanjung Selor – Malinau
Tanjung Selor – Long Apung
Malinau – Long Apung
Tarakan – Long Bawan
Tanjung Selor – Long Bawan

Realisasi Fisik: 92,3% (374 penerbangan),
Realisasi Keuangan Rp 92,3 persen (Rp. 6,8 miliar)

Rute Penumpang Sungai:
Mansalong – Panas
Mansalong – Suka Maju
Mansalong – Sumentobol
Mansalong – Binter
Mansalong – Tau Lumbis
Mansalong – Labang

Realisasi Fisik 100% (157 trip),
Realisasi Keuangan 100% (Rp. 472 juta)

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Kaltara 2021

Realisasi SOA Barang APBD Kaltara 2021

- Kayan Hilir (Malinau) Rp. 1,1 miliar
- Sungai Tubu (Malinau) Rp. 977 juta
- Mentarang Hulu (Malinau) Rp. 902,3 juta
- Lumbis Hulu (Nunukan) Rp. 429,9 juta
- Lumbis Pansiang (Nunukan) Rp. 458,6 juta
- Lumbis Ogong (Nunukan) Rp. 448,5 juta
- Tulin Onsoi (Nunukan) Rp. 419,5 juta
- Seimanggaris (Nunukan) Rp. 420,6 juta
- Nunukan (Nunukan) Rp. 419,9 juta
- Krayan (Nunukan) Rp. 1,9 miliar
- Bahau Hulu (Malinau) Rp. 197,8 juta
- Pujungan (Malinau) Rp. 197,8 juta
- Sembakung (Nunukan) Rp. 197,6 juta

Sumber: Disperindagkop Prov. Kaltara 2021

Meramu Simpul Industri Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi yang dapat diandalkan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah dan masyarakat. Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki banyak potensi wisata, baik wisata budaya, keindahan alam, keanekaragaman hayati, dan obyek-obyek wisata lainnya.

Obyek wisata budaya di Provinsi Kaltara memiliki potensi untuk dapat dikembangkan menjadi obyek wisata unggulan karena budaya yang terdapat di dalamnya masih murni. Sejauh ini, terdapat sembilan desa wisata yang sudah dikembangkan. Wisata alam yang saat ini pun telah dikembangkan misalnya Taman Nasional Kayan Mentarang di Kabupaten Malinau dan obyek wisata Karang Malingkit di Kabupaten Bulungan.

Taman Nasional Kayan Mentarang merupakan obyek wisata hutan tropis yang di dalamnya terdapat flora dan fauna khas Kalimantan, seperti Banteng Kalimantan, Gajah Kalimantan, serta ditemukan pula Bunga Raflesia Arnoldi. Sementara itu, obyek wisata Karang Malingkit merupakan obyek wisata yang diunggulkan dengan wisata bawah lautnya. Obyek wisata ini memiliki berbagai macam jenis karang dan biota laut yang indah.

Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum dan Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si berkomitmen dan serius untuk mengembangkan obyek-obyek wisata agar memberi efek ganda terhadap perekonomian masyarakat dan Provinsi Kaltara secara umum. Meski tidak mudah, Gubernur dan Wakil Gubernur berupaya mengurai satu per satu permasalahan sektor pariwisata di provinsi termuda ini. Pertama, Pemprov Kaltara meramu cara untuk meningkatkan pengusaha terhadap obyek-obyek wisata yang ada. Unsur-unsur pengusaha obyek pariwisata itu meliputi pengembangan atraksi (daya tarik), fasilitas yang diperlukan di obyek wisata, infrastruktur, transportasi, dan hospitality (keramahmataman).

Saat ini, kegiatan kepariwisataan daerah mulai 'digairahkan' untuk menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satunya yang kerap dieksplor ialah potensi wisata Sungai Kayan yang dipadukan dengan pesta budaya dan olahraga: 'Festival Sungai Kayan'. Gelaran ini mampu mengangkit minat wisatawan lokal. Diharapkan setiap gelarannya ke depan, mampu menarik minat wisatawan dari provinsi tetangga bahkan wisatawan mancanegara dengan gelaran even yang lebih luas dan lebih besar.

Obyek daya tarik wisata berbasis ekoturisme juga



Foto: Dokpim Kaltara/Johan

didorong. Mengingat hamaran hutan dan kekayaan di dalamnya yang masih alami, ditambah kehadiran Taman Nasional Kayan Mentarang dan beberapa obyek wisata hutan bakau dan kawasan konservasi lainnya. Pengembangan ekoturisme saat ini diawali dengan mengurai permasalahan ketersediaan sarana dan prasarana, juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola obyek wisata tersebut.

Pemprov Kaltara juga mulai merancang paket-paket wisata yang akan ditawarkan kepada wisatawan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Paket wisata yang sudah ada seperti, wisatawan diarahkan untuk berwisata di Kota Tarakan yang dilanjutkan ke Kabupaten Bulungan, dan berakhir di Derawan, Kabupaten Berau (Kalimantan Timur).

Berbagai pendukung sektor pariwisata di provinsi ini mulai bertambah, seperti hadirnya hotel jaringan internasional di Tanjung Selor, serta mulai adanya travel agent baru yang mulai beroperasi.

Selanjutnya, sumber daya manusia bidang pariwisata atau pelaku pariwisata (pemandu wisata) di provinsi ini terus ditingkatkan dan

didorong. Mengingat hamaran hutan dan kekayaan di dalamnya yang masih alami, ditambah kehadiran Taman Nasional Kayan Mentarang dan beberapa obyek wisata hutan bakau dan kawasan konservasi lainnya. Pengembangan ekoturisme saat ini diawali dengan mengurai permasalahan ketersediaan sarana dan prasarana, juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola obyek wisata tersebut.

Pemprov Kaltara juga mulai merancang paket-paket wisata yang akan ditawarkan kepada wisatawan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Paket wisata yang sudah ada seperti, wisatawan diarahkan untuk berwisata di Kota Tarakan yang dilanjutkan ke Kabupaten Bulungan, dan berakhir di Derawan, Kabupaten Berau (Kalimantan Timur).

Berbagai pendukung sektor pariwisata di provinsi ini mulai bertambah, seperti hadirnya hotel jaringan internasional di Tanjung Selor, serta mulai adanya travel agent baru yang mulai beroperasi.

Selanjutnya, sumber daya manusia bidang pariwisata atau pelaku pariwisata (pemandu wisata) di provinsi ini terus ditingkatkan dan

Ragam Pariwisata

tersertifikasi untuk men-support industri pariwisata daerah.

Selain penginapan dan pemandu wisata, salah satu fasilitas pendukung yang berperan sebagai potensi pendapatan untuk masyarakat lainnya adalah adanya toko souvenir yang dapat dimanfaatkan untuk menjual kerajinan tangan atau cenderamata khas objek wisata tersebut.

"Daya tarik dan fasilitas tidak dapat dicapai dengan mudah jika belum tersedia infrastruktur dasar di lokasi obyek wisata. Infrastruktur dapat berupa jaringan jalan, jaringan komunikasi, jaringan air bersih, jaringan listrik, dan lain sebagainya. Aksesibilitas wilayah khususnya yang menuju obyek wisata menjadikan kunci penting dari semua simpul industri pariwisata kita. Hal inilah yang terus kita benahi," tutur Gubernur.

Selain aksesibilitas, infrastruktur pendukung lainnya juga didorong untuk memajukan sektor pariwisata di provinsi ini secara optimal. Lalu, ketersediaan layanan transportasi atau pengangkutan sangat dibutuhkan dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata. Sisi transportasi akan menentukan jarak dan waktu dalam suatu perjalanan wisata.

Masih rendahnya aksesibilitas berkorelasi dengan ketersediaan layanan transportasi yang tersedia untuk menuju obyek wisata di provinsi ini. Sebagian besar obyek wisata masih sulit diakses dengan melalui jalur darat. Hal ini menjadi tantangan Pemprov Kaltara untuk dapat menghubungkan objek wisata dengan jalan yang telah terbangun.

Di Kaltara, terdapat obyek wisata yang untuk mencapainya harus menggunakan transportasi udara, seperti menuju obyek wisata Taman Nasional Kayan Mentarang, obyek wisata Bukit Yuvai Semaring, dan obyek wisata lainnya. Bahkan selain dengan pesawat terbang, untuk dapat melanjutkan perjalanan menuju Taman Nasional Kayan Mentarang, wisatawan juga harus menempuh jalur sungai.

Terkait kelembagaan pariwisata, pada tingkat provinsi telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau *Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Sementara itu, sebagian besar obyek wisata di Provinsi Kaltara saat ini sudah dibentuk kelembagaan berupa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Karang Taruna sebagai pelaku pariwisata lokal. Para pelaku pariwisata tersebut dituntut untuk memiliki keuletan dan keramah tamahan (hospitality), karena keramah tamahan pelaku pariwisata tersebut merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh pengelola obyek wisata supaya para wisatawan merasa aman dan nyaman selama melakukan perjalanan wisata.



Foto: Dokpim Kaltara/Khair



Foto: Dokpim Kaltara/Khair



Foto: Dokpim Kaltara/Khair

"Jika daya tarik, fasilitas, infrastruktur, transportasi, dan keramah tamahan telah terbangun dengan baik, kita optimistis investasi sektor pariwisata yang juga bagian komponen pendukung perkembangan kegiatan pariwisata di daerah, akan masuk karena mereka (investor sektor pariwisata) bisa mendapatkan pengembalian modal (return on investment) yang layak dari kunjungan wisatawan yang masuk," tutur Gubernur. *

Ragam Pariwisata



BIRO KEPIM KALTARA

bangga melayani bangsa | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA | BerAKHLAK

SEKTOR PARIWISATA 2021

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program Pemasaran Pariwisata

Wisatawan 276.930 orang Rp 1.186.088.969	Cakupan kapasitas SDM pariwisata dan ekraf 60 % Rp 1.266.487.574
Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapat layanan ekraf 60 % Rp 395.422.351	Jumlah SDM yang dilatih di bidang pariwisata 100 orang Rp 327.120.170
Jumlah layanan ekonomi kreatif 2 Kegiatan Rp 99.900.475	Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata 80 orang Rp 174.824.513
Data pasar produk kreatif yang dihasilkan 4 Produk Rp 44.930.000	Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang terfasilitasi ikut Sertifikasi Kompetensi 100 orang Rp 99.780.898

Sumber: Bappenas & Bidang Kalimantan Utara | BIRU KEPIM KALTARA

SOP Permohonan Pembuatan NASKAH SAMBUTAN

untuk OPD Pemprov Kaltara dan lembaga umum lainnya



<https://adpim.kaltaraprov.go.id/formulir-permohonan-membuka-acara-dan-sambutan/>



Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pembuatan Naskah Sambutan yang dilengkapi dengan **pointer** dan **contact person**



Surat Permohonan Pembuatan Naskah Sambutan diajukan kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan **1 minggu** atau **paling lambat 4 hari** sebelum kegiatan pemohon dilaksanakan



Surat Permohonan Pembuatan Naskah Sambutan didisposisi kepada Tim Penyusun Naskah Sambutan



Tim Penyusun membuat sambutan berdasarkan **pointer** yang telah ditentukan oleh pihak pemohon



Tim Editor (Kasubbag, Kabag, dan Kepala Biro) melakukan koreksi atas naskah sambutan dan selanjutnya naskah sambutan diberikan kepada pemohon dan/atau ajudan pimpinan



Ajudan dan/atau pemohon memberikan naskah sambutan kepada Gubernur/Wakil Gubernur atau pejabat yang didisposisi untuk memberikan sambutan

Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadan 1443H / 2022

Marhaban Ya Ramadan



Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum.
Gubernur Kalimantan Utara

Dr. Yansen TP, M.Si.
Wakil Gubernur Kalimantan Utara

SOP Permohonan Pembuatan DESAIN GRAFIS

Backdrop/Baliho/Spanduk untuk OPD Pemprov Kaltara



<https://adpim.kaltaraprov.go.id/permohonan-pembuatan-desain-grafis/>



Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pembuatan Desain yang dilengkapi dengan konsep desain berupa :
- Redaksi penulisan pada desain
- Ukuran desain
- Materi pelengkap lainnya



Surat Permohonan Pembuatan Desain diajukan kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan **1 minggu** atau **paling lambat 4 hari** sebelum kegiatan pemohon dilaksanakan



Surat Permohonan Pembuatan Desain didisposisi kepada Tim Desain



Tim Desain membuat berdasarkan konsep desain yang telah ditentukan oleh pihak pemohon



Tim Desain menyerahkan hasil desain kepada Tim Editor (Kasubbag, Kabag, dan Kepala Biro) dan selanjutnya untuk diserahkan kepada pihak pemohon



Hasil koreksi Tim Editor selanjutnya diserahkan diserahkan kepada pihak pemohon

Calendar Of Event Kaltara 2022

Januari

- Karnaval Budaya
Desa Long Loreh - Malinau

Februari

- Cap Go Meh - Bulungan

Maret

- Hari Organic - Nunukan
- Irau Tidung Bersatu - Nunukan
- Festival Seni Budaya - Tana Tidung

April

- Irau Pangehrani - Nunukan
- Irau Aco Lundayeh - Nunukan
- Rame O'o Ajo - Malinau

Juni

- Festival Lawasuji - Nunukan
- Pemilihan Duta Wisata
- Semandak Buayoi - Tana Tidung
- Tana Tidung 2 Gether - KTT
- Hut Desa Pulau Sapi - Malinau

Juli

- Festival Agabag - Nunukan

Agustus

- Irau Rayeh Lundayeh - Nunukan
- Pesta Rakyat - KTT

September

- Beijo Sapor - Nunukan
- Tana Tidung Fashion Carnival - KTT
- Creative Day - KTT
- Seputuk Cornfest - KTT
- Musik Alam Fest 2K22 - Bulungan
- Kayan Karnival - Bulungan
- Festival Budaya Adat Tana Tidung - Bulungan

Oktober

- Irau Nunukan - Nunukan
- Gelar Budaya Adat Dumud - Tarakan
- Birau Bulungan - Bulungan
- Kaltara Menyeduh - Bulungan
- Bulungan Sultanate Fest - Bulungan
- Kaltara Begimpor - Bulungan
- Kaltara Motofest - Bulungan
- Sumpah Bedolop - Nunukan
- Irau Malinau - Malinau
- Hut Desa Setulang - Malinau
- Pekan Promosi Budaya - Malinau
- Desa Wisata Serindit

November

- Festival Budaya Sungai Kayan - Bulungan

Desember

- Iraw Tengkeyu - Tarakan



Calendar Of Event
Kaltara 2022